

POLITIK PEMEKARAN WILAYAH
(Studi Terhadap Pemekaran Kecamatan Sukamaju Selatan Di Kabupaten Luwu
Utara)



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Ilmu Politik
Jurusan Ilmu Politik pada Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Oleh:

EVA YUNITA

NIM: 30600114074

FAKULTAS USHULUDDIN FILSAFAT DAN POLITIK
UIN ALAUDDIN MAKASSAR

2018

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eva Yunita
NIM : 30600114074
Tempat/Tanggal Lahir : Munte / 07 April 1997
Jurusan/Prodi : Ilmu Politik
Fakultas/Program : Ushuluddin, Filsafat dan Politik / Strata 1 (S1)
Alamat : Samata, Gowa
Judul : POLITIK PEMEKARAN WILAYAH
(Studi Terhadap Pemekaran Kecamatan Sukamaju Selatan di
Kabupaten Luwu Utara)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata Gowa, 07 September 2018

Penyusun,

Eva Yunita

NIM: 30600114074

PENGESAHAN SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Skripsi yang berjudul "POLITIK PEMEKARAN WILAYAH (Studi Terhadap Pemekaran Sukamaju Selatan di Kabupaten Luwu Utara)" disusun oleh Eva Yunita, Nim: 30600114074, mahasiswa Jurusan Ilmu Politik pada Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik UIN Alauddin Makassar telah diuji dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Jum'at, 10 Agustus 2018 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Politik (dengan beberapa perbaikan).

Samata Gowa, 07 September 2018

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Dr. Abdullah, M.Ag.
Sekretaris : Ismah Tita Ruslin, S.IP., M.Si.
Munaqisy I : Dr. Anggriani Alamsyah, M.Si.
Munaqisy II : Syahrir Karim, M.Si., Ph.D.
Pembimbing I : Ismah Tita Ruslin, S.IP., M.Si.
Pembimbing II : Fajar, S.Sos., M.Si.

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik

UIN Alauddin Makassar



Prof. Dr. H. Muh. Natsir, MA.

NIP: 1959074 1 98903 1 003

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Puji Syukur kita panjatkan kehadiran Allah swt, Allah Tuhan semesta alam, yang maha pengasih lagi maha penyayang yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: “POLITIK PEMEKARAN WILAYAH (Studi Terhadap Pemekaran Kecamatan Sukamaju Selatan di Kabupaten Luwu Utara)”.

Shalawat serta salam tak lupa pula penulis haturkan kepada baginda Rasulullah saw, dimana atas ajarannya sehingga manusia dapat melangkah dari zaman kejahiliaan menuju zaman kepintaran dan kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan yang membawa manusia kejalan orang-orang yang berada dalam naungan mahabbah sang Rabb yaitu orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan pelajaran dan pengajaran yang luar biasa banyak. Dimana, kita didorong untuk belajar mengaktualisasikan diri ditengah-tengah masyarakat terkait pengetahuan yang dimiliki, serta bagaimana cara melihat dinamika sosial yang ada dalam masyarakat serta berbagai relasi yang hadir melalui hubungan sosial. Selain itu, penulis juga telah melalui proses yang cukup lama dengan berbagai kesulitan yang dihadapi dan beberapa faktor penghambat seperti kemalasan dan terbatasnya kemampuan dan wawasan penulis. Namun, mampu penulis lewati berkat pertolongan dan petunjuk dari Allah swt, kesakralan doa orang tua, dorongan, petunjuk dan motivasi dari pembimbing, berbagai masukan dari penguji dan kerja keras penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan syukur dan terimakasih yang tak terhingga penulis ucapkan kepada makhluk Allah yang teristimewa yaitu kedua orang tua penulis yakni ayah: Bahar

Muharram dan ibu: Nuryadi yang menjadi sosok inspiratif yang tak kenal lelah dalam merawat, mendidik, membiayai dan mendoakan penulis untuk dapat menyelesaikan studi ini. Berkat kerja keras, doa dan nasehat yang selalu mengiringi langkah penulis, memberi kemudahan tersendiri dalam segala urusan yang dihadapi oleh penulis sebab ridho Allah adalah ridho orang tua semoga beliau senantiasa berumur panjang dan tetap dalam lindungan Allah.

Tulisan ini tidaklah akan terwujud tanpa melalui bantuan dari berbagai pihak. Oleh karenanya, penulis juga patut menyampaikan ucapan terimakasih kepada berbagai pihak yang telah membantu penulis baik secara moril, spirit, maupun materil yang utama dan terkhusus kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si., selaku Rektor UIN Alauddin Makassar dan para Wakil Rektor I, II, III dan IV sebagai penentu kebijakan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. Bapak Prof. Dr. H. Muh. Natsir, MA., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik UIN Alauddin Makassar dan para Wakil Dekan I, II, III yang telah membantu penulis dalam mengurus persuratan, penelitian dan berbagai kebutuhan akademik penulis.
3. Bapak Syahrir Karim, M.Si., Ph.D., selaku penguji II sekaligus selaku Ketua Jurusan Ilmu Politik dan Dr. Anggriani Alamsyah, M.Si., selaku penguji I yang telah banyak memberikan kritikan dan masukan yang sifatnya membangun dalam penulisan studi ini.
4. Ibu Ismah Tita Ruslin, S.IP., M.Si., selaku pembina akademik Ilmu Politik 3/4, selaku pembimbing I dan sekaligus selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Politik dan Bapak Fajar, S.Sos., M.Si., selaku pembimbing II yang

telah begitu banyak memberikan bimbingan dan pelajaran secara intensif, memberikan waktu luang, dorongan dan motivasi yang begitu berharga, sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini dengan baik terkait judul yang diangkat penulis.

5. Dosen serta seluruh staf akademik Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik yang sangat banyak membantu penulis dalam menyukkseskan pencapaian penulisan skripsi ini.
6. Kepada seluruh staf perpustakaan Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik, staf perpustakaan kampus UIN Alauddin Makassar dan staf perpustakaan Daerah yang telah memberikan pelayanan dan bantuan kepada penulis dalam mencari bahan landasan dan berbagai literatur yang mendukung tulisan ini.
7. Ketua DPRD Luwu Utara, Anggota DPRD Luwu Utara, Kabag Administrasi Pemerintahan Umum Luwu Utara, Kabag Pemerintahan Umum Luwu Utara, Camat Sukamaju, Ketua Pemekaran Kecamatan Sukamaju Selatan, Tokoh Masyarakat Kecamatan Sukamaju Selatan dan Masyarakat Sukamaju Selatan yang telah membantu penulis dalam memberikan data serta informasi penelitian terkait dengan penelitian yang dilakukan.
8. Kepada saudara dan saudariku yang menjadi penyemangat dan selalu mendoakan penulis dalam penyelesaian studi ini yaitu Rahmat, Syair, Yasir, Miftahul Jannah dan Muslim Bahar Muharram.

9. Kepada sahabatku yang menjadi penyemangat dan selalu mendoakan penulis dalam penyelesaian studi ini yaitu Shita, Ayu, Putri, Dewi, Ita, Wiwin, Nanda, Risma, Wawan, Arham, Ardi, Ariel, dan Adit.
10. Kepada teman-teman seperjuangan yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan studi ini. Kepada teman teristimewaku yang selalu membantu dan ada dalam keadaan susah maupun senang dan setia menemani penulis dalam setiap proses perkuliahan hingga ke tahap penyelesaian yaitu saudariku Dian, Rahmi dan Siti Khadijah Agus.
11. Dan kepada seluruh teman-teman Jurusan Ilmu Politik Angkatan 2014, yang telah memberikan dorongan dan semangat terkhususnya kepada teman-temanku Ilmu Politik 3/4, yaitu: Nurmila, Rahmat Hidayat, Hardianti, Deswina, Andi Irdyanti, Andika MK, Mustari, Urwah Rahmadi, Andi Ilham Syam, Muh. Yusuf WK, Abdul Hafids, dan semua teman-teman yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu.

Akhirnya kata penulis berharap semoga keberadaan skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak.

Wabillahi Taufik Walhidayah

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Samata Gowa, 07 September 2018

Penyusun

Eva Yunita

NIM: 30600114074

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1-16
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Tinjauan Karya Terdahulu	10
BAB II LANDASAN TEORI.....	17-22
A. Teori	17
1. Desentralisasi.....	17
2. Elit	19
B. Kerangka Konseptual	22
BAB III METODE PENELITIAN.....	23-29
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	23
B. Pendekatan Penelitian	23

C. Sumber Data.....	24
D. Teknik Pengumpulan Data.....	25
E. Informan.....	27
F. Instrumen Penelitian.....	27
G. Teknik Analisis Data.....	28
 BAB IV ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN	30-61
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	30
B. Pengkajian Syarat Pemekaran Kecamatan Sukamaju Selatan	39
C. Latar Belakang Munculnya Isu Pemekaran Kecamatan Sukamaju Selatan.....	42
D. Proses Politik Yang Terjadi Sampai Terbentuknya Kecamatan Sukamaju Selatan	50
 BAB V PENUTUP.....	62-63
A. Kesimpulan.....	62
B. Implikasi Penelitian.....	63
 DAFTAR PUSTAKA	64-66
LAMPIRAN.....	90-96
RIWAYAT HIDUP	97

ABSTRAK

Nama : Eva Yunita
NIM : 30600114074
Judul : POLITIK PEMEKARAN WILAYAH (Studi Terhadap Pemekaran Kecamatan Sukamaju Selatan di Kabupaten Luwu Utara)

Skripsi ini membahas tentang Pemekaran Kecamatan Sukamaju Selatan di Kabupaten Luwu Utara. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui latar belakang terbentuknya Kecamatan Sukamaju Selatan dan proses politik yang terjadi sampai terbentuknya Kecamatan Sukamaju Selatan di Kabupaten Luwu Utara. Wacana pemekaran Kecamatan Sukamaju Selatan sudah ada sejak tahun 2002 tetapi baru disahkan pada tahun 2018, berbagai dinamika mewarnai proses pemekaran Kecamatan Sukamaju Selatan.

Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif bersifat deskriptif, yaitu berupa narasi cerita, penuturan informan, dokumen-dokumen, seperti foto dan catatan pribadi. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang dilakukan dengan tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu teori desentralisasi dan teori elit.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa munculnya isu pemekaran Kecamatan Sukamaju Selatan adalah berasal dari usulan masyarakat, yang kesulitan dalam hal akses pelayanan publik karena secara geografi medan yang cukup jauh dan juga berpengaruh terhadap ekonomi masyarakat, khususnya dalam memasarkan produknya dikarenakan jarak yang cukup jauh ke ibukota Kecamatan. Adapun proses politik terbentuknya Kecamatan Sukamaju Selatan adalah 1) Usulan masyarakat, terdapat perbedaan pendapat pemerintah dan masyarakat tentang penempatan ibukota Kecamatan Sukamaju Selatan, 2) Pada saat usulan telah masuk ke program legislasi daerah muncul moratorium pemekaran kecamatan, 3) Terbitnya Peraturan Daerah dalam ini proses pemekaran tidak terlepas dari kepentingan politik. Proses pemekaran ini tidak terlepas dari kepentingan aktor elit yaitu Ketua Pemekaran, Tokoh Masyarakat, Ketua dan Anggota DPRD Luwu Utara maupun dukungan dan bantuan dari elit politik Luwu Utara H.M Luthfi Andi Mutty yang merupakan figur yang cukup membantu dalam proses pemekaran Kecamatan Sukamaju Selatan, serta tidak terlepas dari resistensi dalam pemekaran Kecamatan Sukamaju Selatan.

Implikasi penelitian ini adalah terbentuknya Kecamatan Sukamaju Selatan, diharapkan bisa mempermudah masyarakat dalam urusan pelayanan, baik dalam urusan administrasi maupun kependudukan, mampu meningkatkan pembangunan (ekonomi) masyarakat.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perubahan sistem kekuasaan negara pasca reformasi tahun 1998 terutama pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (yang direvisi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan direvisi kembali menjadi Undang-Undang 23 Tahun 2014) memberi peluang otonomi daerah yang luas. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, orientasi pembangunan diubah dari prinsip efesiensi dan pertumbuhan menjadi prinsip kemandirian dan keadilan. Dalam kondisi orientasi pembangunan yang demikian, maka orientasi penyelenggaraan pembangunan bergeser ke arah desentralisasi. Salah satu implikasi dari perubahan paradigma penyelenggaraan pembangunan tersebut adalah timbulnya fenomena pemekaran wilayah. Pemekaran wilayah pada otonomi daerah seakan punya daya tarik tersendiri, sehingga tidak heran jika terus menjadi perbincangan diberbagai kalangan. Kuatnya wacana tersebut juga semakin menguatkan kontroversi dan perdebatan antar elit, kelompok masyarakat bahkan pembuatan kebijakan sekalipun. Belum lagi tanggapan masyarakat beragam yang sedikit banyak meramalkan kontroversi tersebut. Banyak yang mempertanyakan urgensi gagasan manuver tersebut dengan berbagai alasan mendasar seperti alasan politik, sosiologis, religius bahkan historis.¹

¹Andik Wahyun Muqoyyidin, “Pemekaran Wilayah dan Otonomi Daerah Pasca Reformasi di Indonesia: Konsep, Fakta Empiris dan Rekomendasi ke Depan”, *Jurnal Konstitusi* 10, no. 2 (2013): h. 2.

Dengan otonomi maka akan tercipta mekanisme, dimana daerah dapat mewujudkan sejumlah fungsi politik terhadap pemerintahan nasional, hubungan kekuasaan menjadi lebih adil sehingga, dengan demikian, daerah akan memiliki kepercayaan dan akhirnya akan terintegrasikan ke dalam pemerintah nasional. Dengan otonomi, maka proses demokrasi dapat dijalankan yang juga akan menopang terwujudnya demokrasi dalam pemerintahan, dan pada akhirnya pembangunan daerah akan dipercepat. Landasan hukum kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, kemudian direvisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dan kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, beserta berbagai Peraturan Pemerintahan Nomor 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah.²

Otonomi menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), yaitu pola pemerintahan sendiri. Sedangkan otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³ Sedangkan tujuan otonomi daerah adalah mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan masyarakat sehingga tujuan yang diharapkan dapat menumbuhkembangkan daerah dalam berbagai bidang, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menumbuhkan kemandirian daerah dan meningkatkan daya saing daerah dalam proses

²Andik Wahyun Muqoyyidin, "Pemekaran Wilayah dan Otonomi Daerah Pasca Reformasi di Indonesia: Konsep, Fakta Empiris dan Rekomendasi ke Depan", *Jurnal Konstitusi* 10, no. 2 (2013): h. 4.

³Departement Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 992.

pertumbuhan.⁴ Adapun hadis yang menjelaskan tentang wewenang atau tugas pemimpin sebagaimana sabda Rasulullah saw berbunyi:

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ أَلَا كُلكُمْ رَاعٍ وَكُلكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَإِلَّا مِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلَا فَكُلكُمْ رَاعٍ وَكُلكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ⁵

Artinya:

Hadis riwayat Ibnu Umar Ra: ia berkata: Dari Nabi saw bahwa beliau bersabda: Ketahuilah! Masing-masing kamu adalah pemimpin, dan masing-masing kamu akan dimintai pertanggung jawaban terhadap apa yang dipimpin. Seorang raja yang memimpin rakyat adalah pemimpin, dan ia akan dimintai pertanggung jawaban terhadap apa yang dipimpinnya. Seorang suami adalah pemimpin anggota keluarganya, dan ia akan dimintai pertanggung jawaban terhadap mereka. Seorang istri juga pemimpin bagi rumah tangga serta anak suaminya, dan ia akan dimintai pertanggung jawaban terhadap yang dipimpinnya. Seorang budak juga pemimpin atas harta tuannya, dan ia akan dimintai pertanggung jawaban terhadap apa yang dipimpinnya. Ingatlah! Masing-masing kamu adalah pemimpin dan masing-masing kamu akan dimintai pertanggung jawaban atas apa yang dipimpinnya.

Rakyat adalah amanat yang berada ditangan pemimpin yang harus mereka jaga, harus mereka layani, dan harus pula mereka berdayakan demi kemaslahatan mereka. Siapapun orang yang oleh Allah diberi wewenang untuk mengatur kehidupan manusia maka mereka harus menjaga mereka dengan kebijakannya dan dengan hati

⁴H. A. W. Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 17.

⁵Muslim Bin AL Hajjaj bin Muslim Bin Kausyaz AL-Qusyairi An-Naisaburi, *AL Jami' as Shahih*, Jus VI (Bairut Daarul Bairut, 1374 H), h. 7.

yang tulus mengatur mereka, sehingga semua kepentingan mereka tetap terjaga seperti halnya kepentingan dirinya sendiri.⁶

Pelaksanaan desentralisasi yang dilakukan bukan sekedar pembagian kekuasaan, tetapi bagaimana kekuasaan yang beriringan dengan kewenangan untuk melakukan pemerintahan sendiri. Dalam figurasi peningkatan pelayanan dan menuju kesejahteraan rakyat semata. Bukan karena jabatan atau memenuhi ambisi elit politik yang tidak berdasarkan nilai-nilai politik yang hakiki.

Semua mengakui bahwa pembentukan pemerintahan otonomi daerah bermaksud untuk mendekatkan kekuasaan dengan rakyat. Hal tersebut dapat terwujud melalui hubungan yang baik antara masyarakat dengan pemerintah, melalui hubungan sosial itulah yang kemudian melahirkan tujuan untuk memakmurkan rakyat daerah, serta mempercepat kemakmuran itu dinikmati rakyat. Pemerintah daerah yang dianggap lebih mengetahui kebutuhan rakyat dan daerahnya, akan lebih mempercepat baik dalam hal pembangunan untuk mencapai efektivitas dan efesiensi dalam pelayanan masyarakat. Serta meningkatkan akses rakyat terhadap berbagai kebijakan.⁷

Pemekaran daerah di Indonesia adalah pembentukan wilayah administratif baru di tingkat provinsi serta kota dan kabupaten diinduknya. Landasan hukum untuk pemekaran daerah di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan keluarnya Undang-Undang tersebut, daerah banyak menuntut adanya pemekaran. Alasan mendasar terjadinya pemekaran daerah

⁶Umar Sidiq, "Kepemimpinan Dalam Islam: Kajian Termatik Dalam Al-Qur'an dan Hadits", *Dialogia*, Vol.12 No. 1 Juni (2014): h. 10.

⁷Khairul Ikhwan Damanik, dkk., *Otonomi Daerah, Etnonasionalisme, dan Masa Depan Indonesia: Berapa Persen Lagi Tanah dan Air Nusantara Milik Rakyat?* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010), h. 214.

adalah peningkatan kesejahteraan rakyat lokal. Selama ini, sumber daya cenderung ditarik ke daerah induk sehingga daerah yang jauh dari pusat kekuasaan tertinggal. Selain itu, pemekaran juga untuk peningkatan pelayanan sehingga tidak perlu pergi jauh untuk mengurus sesuatu keprovinsi/kabupaten. Memperpendek rentan kendali karena cakupan yang cukup luas menyebabkan organisasi tidak dapat berjalan efektif.⁸ Selain itu, pemekaran daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dalam hidup bermasyarakat yang sesuai dengan ajaran islam sehingga dapat dikatakan bahwasanya kesejahteraan dimanfaatkan sesuai dengan firman allah dam Q.S. Al-A'raf/7:10 sebagai berikut:

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِشَةً قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ١٠

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di bumi dan Kami adakan bagi kamu di bumi itu penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur.”⁹

Berdasarkan ayat di atas, kesejahteraan yang telah Allah berikan dengan beberapa kenikmatan hidup walaupun amat sedikit manusia yang bersyukur, dapat juga berarti bahwa kesyukuran manusia kepada Allah swt sangat sedikit. Namun pada hakikatnya Allah telah memberikan kesejahteraan hidup berupa kebutuhan hidup manusia yang tidak akan terhitung seberapa besar dan banyak nikmat yang Allah berikan. Dimana dalam kontek pembentukan daerah otonomi baru banyak menuntut adanya kesejahteraan rakyat untuk bisa hidup yang lebih baik lagi, karena hakikat

⁸Mudrajad Kuncoro, *Perencanaan Daerah: Bagaimana Membangun Ekonomi Lokal, Kota dan Kawasan?* (Jakarta: Salemba Empat, 2012), h. 300-301.

⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al Karim dan Terjemahan* (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1996), h. 120.

pemekaran itu sendiri adalah untuk memperpendek rentan kendali pemerintah, mempercepat pemberian pelayanan dan pembangunan.¹⁰

Sejalan dengan kebutuhan masyarakat akan pelayanan yang berkualitas dari pemerintah, maka pemekaran wilayah dianggap salah satu solusi terciptanya pelayanan publik yang efektif dan efisien dan berkualitas. Karena salah satu tujuan pemekaran adalah untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Namun menciptakan pelayanan publik disuatu daerah yang baru dimekarkan bukanlah hal yang instan. Butuh kerja keras bukan hanya dari aparat pemerintah saja yang merupakan pelaksana tugas pemerintahan, tetapi juga butuh kerjasama yang baik dari masyarakat. Karena kerja keras yang baik dari pemerintah kecamatan tidak di topang dari masyarakat, maka itu akan sia-sia.¹¹

Awal wacana pemekaran Kecamatan Sukamaju Selatan terjadi pada tahun 2002. Namun berselangnya waktu, wacana pemekaran ini dihentikan sementara waktu, karena melihat sekelompok masyarakat telah melakukan kepentingan politik dalam pemekaran Kecamatan Sukamaju Selatan.

Usulan pemekaran yang terjadi di Luwu Utara kembali mencuat sejak akhir tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 403 yang menjadi dasar untuk mengangkat kembali usulan pemekaran Kecamatan Sukamaju Selatan, pemerintah Kabupaten Luwu Utara merespon usulan masyarakat tentang pembentukan Kecamatan Sukamaju Selatan. Usulan warga tersebut telah dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dan telah masuk Program Legislasi

¹⁰M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 23.

¹¹Yulius Abbas, *Efektivitas Pemekaran Kecamatan dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Tompaso Barat, Minahasa: suatu studi pelayanan administrasi legalisir*, (Ilmu Pemerintahan), h. x.

Daerah (Prolegda) Luwu Utara tahun 2017.¹² Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Kabupaten Luwu Utara, Sulsel, tengah membahas Ranperda pembentukan Kecamatan Sukamaju Selatan. Pansus II yang diketuai Aris Mustamin melakukan konsultasi ke Kemendagri di Jakarta, melalui pembahasan mengenai pembentukan daerah persiapan sebagaimana dimaksud harus memenuhi persyaratan dasar dan persyaratan administratif pemekaran kecamatan.¹³

Kecamatan Sukamaju, terdiri dari 25 desa yang semuanya berstatus definitif. Desa Tamboke dengan luas wilayah meliputi 63,11 Km² merupakan desa terluas di Kecamatan Sukamaju. Sedangkan desa yang paling jauh dari ibukota kecamatan adalah Desa Minanga Tallu, berjarak 15 Km dari Desa Sekamaju. Melihat kondisi permukaan jalan di Kecamatan Sukamaju, terdapat 2 desa dimana jenis permukaan jalannya masih berupa tanah dan sebagian desa lain permukaan jalannya berupa aspal. Melihat kondisi Kecamatan Sukamaju sehingga masyarakat secara terus menerus menginginkan perlu adanya perubahan tata hidup baik dari segi pembangunan maupun pelayanan publik.¹⁴

Tingginya keinginan masyarakat, untuk pemekaran mendapatkan respon positif dari Bupati Luwu Utara, sehingga pemekaran wilayah dalam hal pembentukan harus sesuai dengan syarat pemekaran kecamatan berpodaman dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dipertegas dengan keputusan

¹²Erick, "Pemerintah Kabupaten Luwu Utara Respon Pemekaran Tiga kecamatan", *news.rakyatku.com*. 12 Desember 2016. <http://www.google.com/amp/news.rakyatku.com/amp/31155> (19 November 2017).

¹³Chalik, "Ini Syarat Pembentukan Tiga kecamatan Baru di Luwu Utara", *TribunLutra.com*. 03 Mei 2017. <http://makassar.tribunnews.com/2017/05/03/ini-syarat-pembentukan-tiga-kecamatan-baru-di-luwu-utara> (19 November 2017).

¹⁴id.m.wikipedia.org/wiki/Sukamaju_Luwu_Utura (04 Mei 2018).

dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang pedoman pembentukan kecamatan yang tercantum didalamnya syarat pemekaran pada Pasal 3. Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah, Kabupaten Luwu Utara sebagai salah satu daerah otonom dituntut untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, bangsa dan negara yang mencerminkan lewat kinerja aparat pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang sesuai dengan perkembangan teknologi dan pertumbuhan serta peningkatan kebutuhan dasar masyarakat. Titik berat otonomi daerah saat ini adalah desa atau kecamatan, dimana pelayanan paling dekat dengan masyarakat dan secara langsung. Oleh karena itu, pelaksanaan pelayanan publik sangat penting untuk diperhatikan.¹⁵

Pada tahun 2018 di Gedung DPRD Luwu Utara telah selesai mengesahkan Peraturan Daerah untuk pemekaran Kecamatan Sukamaju Selatan, dalam keputusan paripurna bersama pemerintah daerah Luwu Utara. keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor: 188.4/2/DPRD-LU/III/2018 tentang persetujuan penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan Kecamatan Sukamaju Selatan Nomor 01 Tahun 2018.¹⁶

Melihat hal tersebut, dari awal wacana tahun 2002 hingga pengesahan Peraturan Daerah pada tahun 2018 melalui proses yang cukup lama tidak terlepas terjadinya kepentingan politik dalam pemekaran ini yaitu kecenderungan para elit untuk mengambil jabatan seperti menginginkan menjadi camat atau wakil camat,

¹⁵Ernan Rustiadi, dkk., *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011), h. 366.

¹⁶Chalik, "Hasil Pemekaran, Luwu Utara Resmi Punya Tiga Kecamatan Baru", *TribunLutra.Com*. 13 Maret 2018. <http://www.google.com/amp/makassar.tribunnews.com/amp/2018/03/13/hasil-pemekaran-luwu-utara-resmi-punya-tiga-kecamatan-baru?espv=1> (04 Mei 2018).

perebutan ibukota kecamatan baru dan melihat tingginya keinginan masyarakat untuk pelayanan publik yang lebih baik seperti dalam hal administrasi, pembangunan (ekonomi) dan sebagainya. Pentingnya syarat-syarat dan kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah dalam pembentukan daerah otonomi baru kecamatan Sukamaju Selatan di kabupaten Luwu Utara, menjadikan penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan tema: **POLITIK PEMEKARAN WILAYAH** (Studi Terhadap Pemekaran Kecamatan Sukamaju Selatan di Kabupaten Luwu Utara).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penyusun merumuskan pokok masalah dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi latar belakang munculnya isu pemekaran Kecamatan Sukamaju Selatan di Kabupaten Luwu Utara?
2. Bagaimana proses politik yang terjadi sampai terbentuknya Kecamatan Sukamaju Selatan di Kabupaten Luwu Utara?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui apa yang menjadi latar belakang munculnya isu pemekaran Kecamatan Sukamaju Selatan di Kabupaten Luwu Utara.
2. Untuk mengetahui bagaimana proses politik yang terjadi sampai terbentuknya Kecamatan Sukamaju Selatan di Kabupaten Luwu Utara.

D. Manfaat Penelitian

Tercapainya tujuan yang telah dirumuskan di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang mencakup pada kepentingan-kepentingan di antaranya:

1. Manfaat Akademik

- a. Diharapkan dapat memberikan manfaat dan dapat berkontribusi di dalam menambah nuansa pada literatur-literatur ilmu sosial pada umumnya dan ilmu politik pada khususnya terutama terkait dengan pembahasan mengenai politik pemekaran wilayah terkait pemekaran Kecamatan Sukamaju Selatan di Kabupaten Luwu Utara.
- b. Diharapkan dapat menjadi literatur yang membantu peneliti berikutnya yang juga akan meneliti seputar pemekaran wilayah.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih yang bernilai dalam masyarakat dan menjadi bahan untuk memahami akan besar dan pentingnya pemekaran sehingga menjadi pertimbangan bagi pemerintah dalam hal proses pembentukan wilayah untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat khususnya di Kecamatan Sukamaju Selatan.
- b. Dapat menjadi bahan pendidikan moral sekaligus contoh panutan bagi tempat lain dalam hal pemekaran diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan dengan maksud untuk memperpendek rentang kendali pemerintah.

E. Tinjauan Karya Terdahulu

Untuk menghindari terjadinya kesamaan terhadap penelitian yang telah ada sebelumnya, penyusun telah melakukan beberapa penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang terikat dengan pemekaran/pembentukan otonom, diantaranya sebagai berikut:

1. “Pengaruh Pemekaran Wilayah Kecamatan Terhadap Pembangunan dan Pelayanan Publik di Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara”, sebuah *skripsi* oleh Lifia Anis Tahara Andi Lantara. Penelitian ini membahas tentang gambaran umum kabupaten Luwu Utara khususnya Kecamatan Tana Lili dari berbagai aspek, proses pembentukan/pemekaran Kecamatan Tana Lili, kondisi pembangunan dan pelayanan publik sebelum dan setelah pemekaran, serta faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kondisi pembangunan dan pelayanan publik di Kecamatan Tana Lili, dimana rencana pemekaran kecamatan ini sudah ada sejak tahun 2010 dan terealisasi tahun 2012, dimana ada beberapa kendala terutama untuk lokasi kantor kecamatan serta nama kecamatan. Hasil penelitian menunjukkan 2 hal yakni, Pertama Kondisi pembangunan dan pelayanan publik setelah pemekaran Kecamatan Tana Lili menjadi lebih baik daripada sebelum pemekaran. Kedua faktor-faktor yang mempengaruhi didukung oleh pemerintah dan masyarakat, pemerintah lebih memperhatikan kebutuhan masyarakat baik dari segi pelayanan maupun pembangunan, dan masyarakat ikut berpartisipasi dalam membantu pemerintah dalam mewujudkan pelayanan dan pembangunan yang lebih baik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif yang diperoleh melalui kuisioner dan didukung oleh data kualitatif melalui wawancara dengan informan dan responden dalam rangka mengetahui implikasi pemekaran wilayah.¹⁷

¹⁷Lifia Anis Tahara Andi Lantara. “Pengaruh Pemekaran Wilayah Kecamatan Terhadap Pembangunan dan Pelayanan Publik di Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara”, *Skripsi* (Makassar: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar, 2016), h. x.

Jadi yang menjadi pembeda dengan skripsi penulis yaitu penelitian penulis lebih fokus terhadap latar belakang munculnya isu pemekaran dan lebih kepada proses pemekaran yang terjadi di Kecamatan Sukamaju Selatan Kabupaten Luwu Utara. Metode yang digunakan penulis yaitu lebih kepada metode kualitatif. Pemekaran wilayah di Kecamatan Sukamaju Selatan, dimana usulan masyarakat di mulai pada tahun 2002 dan terealisasikannya pada tahun 2018.

2. “Pengaruh Pelaksanaan Pemekaran Wilayah Terhadap Kualitas Pelayanan Kartu Tanda Penduduk di Kecamatan Majasari”, sebuah *skripsi* oleh Tata Yusuf K. Fokus penelitian ini adalah pengaruh pelaksanaan pemekaran wilayah terhadap kualitas pelayanan kartu tanda penduduk di Kecamatan Majasari. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pelaksanaan pemekaran wilayah terhadap kualitas pelayanan kartu tanda penduduk di Kecamatan Majasari. Berdasarkan hasil penelitian dengan melakukan uji statistik terbukti bahwa, terdapat pengaruh yang signifikan antara pelaksanaan pemekaran wilayah terhadap kualitas pelayanan kartu tanda penduduk, dengan demikian berarti pelaksanaan pemekaran wilayah ini harus lebih untuk kesejahteraan masyarakat dalam hal pelayanan khususnya pelayanan kartu tanda penduduk. Selain itu pihak kecamatan dapat meningkatkan kinerja para pegawai khususnya di bidang pelayanan di Kecamatan Majasari. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah asosiatif kuantitatif.¹⁸

¹⁸Tata Yusuf K. “Pengaruh Pelaksanaan Pemekaran Wilayah Terhadap Kualitas Pelayanan Kartu Tanda Penduduk di Kecamatan Majasari”, *Skripsi* (Serang: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang, 2010), h. x.

Jadi yang menjadi pembeda dengan skripsi penulis yaitu penulis lebih fokus kepada proses pemekaran wilayah yang terjadi di Kecamatan Sukamaju Selatan, dimana proses itu melalui usulan masyarakat, Ranperda dan terbitnya Peraturan Daerah. Metode yang digunakan penulis yaitu lebih kepada metode kualitatif.

3. “Dampak Pemekaran Dalam Ketersediaan Sarana dan Prasarana Masyarakat Desa Waturempe Kecamatan Tikep Kabupaten Muna”, sebuah *skripsi* oleh Anjar Zakaruddin. Fokus penelitian ini adalah bertujuan untuk mengetahui bagaimana dampak pemekaran terhadap ketersediaan sarana dan prasarana di Desa Waturempe Kecamatan Tikep Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara dalam bentuk ketersediaan infrastruktur jalan raya, fasilitas air bersih, pasar tradisional dan ketersediaan jaringan listrik. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan dasar penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, yaitu pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti, kuisioner, dan wawancara dimana peneliti mengadakan tanya jawab langsung dengan responden maupun informan sehubungan dengan masalah yang diteliti serta ditunjang oleh data sekunder. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pemekaran tidak berdampak signifikan bagi ketersediaan sarana dan prasarana yang dapat terlihat dari tidak adanya fasilitas jalan yang baik, fasilitas air yang tidak sebanding dengan tingkat penggunaan masyarakat, jaringan listrik yang hingga saat ini tidak ada serta pasar tradisional yang tidak beroperasi sehingga menghambat arus perputaran barang dan jasa. Adapun faktor-faktor yang

mempengaruhi tidak berdampaknya pemekaran terhadap Desa Waturempe adalah 1) kondisi geografis, 2) kurangnya inisiatif pemerintah desa dalam pengelolaan urusannya, 3) tendensi politis pasca pilkada kabupaten, 4) kurangnya pendapatan asli desa dan 5) keterbatasan sumber daya pemerintah kabupaten.¹⁹

Jadi yang menjadi pembeda dengan skripsi penulis yaitu penelitian penulis lebih fokus terhadap latar belakang munculnya isu pemekaran dan lebih kepada proses pemekaran yang terjadi di Kecamatan Sukamaju Selatan Kabupaten Luwu Utara.

4. “Implikasi Pemekaran Wilayah Desa Terhadap Pelayanan Publik (Studi Terhadap Implikasi Pembentukan Desa Marada Mundi Terhadap Pelayanan Publik Kepada Masyarakat Desa Marada Mundi, Kecamatan Kabata Mapambuhang, Kabupaten Sumba Timur-NTT)”, sebuah *skripsi* oleh Martinus Hinna Hering Madjangga. Penelitian ini difokuskan pada dua persoalan penelitian yaitu; Pertama, implikasi pemekaran desa terhadap pelayanan publik di Desa Marada Mundi sejak terbentuk menjadi desa definitif. Kedua, faktor-faktor yang mendukung dan menghambat kinerja pelayanan kepada masyarakat ditingkat desa. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif.²⁰

¹⁹Anjar Zakaruddin. “Dampak Pemekaran Dalam Ketersediaan Sarana dan Prasarana Masyarakat Desa Waturempe Kecamatan Tipep Kabupaten Muna”, *Skripsi* (Makassar: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, 2013), h. x.

²⁰Martinus Hinna Hering Madjangga. “Implikasi Pemekaran Wilayah Desa Terhadap Pelayanan Publik (Studi Terhadap Implikasi Pembentukan Desa Marada Mundi Terhadap Pelayanan Publik Kepada Masyarakat Desa Marada Mundi, Kecamatan Kabata Mapambuhang, Kabupaten Sumba Timur-NTT)”, *Skripsi* (Salatiga: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi Universitas Kristen Satya Wacana, 2011), h. x.

Jadi yang menjadi pembeda dengan skripsi penulis yaitu penulis lebih fokus kepada proses pemekaran wilayah yang terjadi di Kecamatan Sukamaju Selatan, dimana proses itu melalui usulan masyarakat, Ranperda dan terbitnya Peraturan Daerah. Pemekaran wilayah yang dijelaskan oleh penulis kepentingan-kepentingan yang terjadi selama proses pemekaran terjadi.

5. “Dampak Pemekaran Kecamatan Pulau Pisang Kabupaten Pesisir Barat Terhadap Kualitas Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan”, sebuah *skripsi* oleh Ahmad Irfan. Adapun fokus penelitian ini adalah untuk mendapatkan deskripsi kualitas pelayanan publik di kantor Kecamatan Pulau Pisang setelah dimekarkan, serta faktor pendukung dan penghambat pelayanan di kantor Kecamatan Pulau Pisang setelah dimekarkan. Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan: wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah kualitas pelayanan publik di kantor Kecamatan Pulau Pisang sudah menerapkan dimensi *Tangibel* (Bukti Fisik), *Reliability* (Kehandalan), *Responsiviness* (Ketanggapan), *Assurance* (Jaminan), dan *Emphaty* (Empati). Indikator yang sudah berjalan sesuai dengan harapan diantaranya penampilan, menggunakan alat bantu, kecermatan pegawai dan kemampuan pegawai dalam menggunakan alat bantu respon pegawai menanggapi pertanyaan, permintaan dan keluhan masyarakat, pegawai melayani dengan tidak diskriminatif. Akan tetapi beberapa indikator belum berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan seperti sarana dan prasarana tidak tertata dengan rapih, fasilitas masih sangat minim, kedisiplinan waktu pegawai yang

sangat rendah, pegawai belum semuanya mampu menggunakan alat bantu, masih terjadi penundaan pelayanan, tidak ada standar pelayanan, ketetapan waktu pelayanan, menanggapi keluhan masyarakat, sikap kurang ramah dan sopan santun pegawai serta sikap menghargai pengguna layanan yang masih kurang. Faktor pendukung pelayanan publik kantor Kecamatan Pulau Pisang adalah rapat koordinasi dan evaluasi, tunjangan daerah khusus atau terpencil sedangkan faktor penghambat pelayanan publik di kantor Kecamatan Pulau Pisang adalah sumber daya aparatur, kesadaran masyarakat, keadaan alam, sarana dan prasarana.²¹

Jadi yang menjadi pembeda dengan skripsi penulis yaitu penelitian penulis lebih fokus terhadap latar belakang munculnya isu pemekaran dan lebih kepada proses pemekaran yang terjadi di Kecamatan Sukamaju Selatan Kabupaten Luwu Utara, dimana proses itu melalui usulan masyarakat, Ranperda dan terbitnya Peraturan Daerah.



²¹Ahmad Irfan. “Dampak Pemekaran Kecamatan Pulau Pisang Kabupaten Pesisir Barat Terhadap Kualitas Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan”, *Skripsi* (Bandar Lampung: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, 2017), h. x.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Teori

Teori merupakan alat untuk melakukan analisis, namun teori bukan merupakan tujuan suatu analisis tetapi merupakan alat untuk memahami suatu kenyataan atau fenomena, tapi kadangkala teori tidak mampu secara tuntas menganalisis sesuatu. Oleh karena itu, melalui suatu penelitian teori dapat dipertajam, diperkuat, atau bahkan sebaliknya dapat dibantah dengan suatu kenyataan yang ada di lapangan.²² Penelitian ini menggunakan beberapa teori yaitu:

1. Desentralisasi

Desentralisasi pada dasarnya adalah suatu proses transfer atau penyerahan sebagian wewenang dan tanggungjawab dari urusan yang semula adalah urusan pemerintah pusat kepada badan-badan atau lembaga-lembaga pemerintah daerah agar menjadi urusan rumahtangganya, sehingga urusan-urusan tersebut beralih kepada daerah dan menjadi wewenang dan tanggungjawab pemerintah daerah.²³

Y. King mengatakan bahwa kebutuhan akan sesuatu bentuk demokrasi tampaknya universal, bahkan pada negara kecilpun memiliki jenis pemerintahan lokal yang memiliki tingkat otonom. B.C. Smith melihat tujuan desentralisasi pada dua sudut pandang. Pertama, kepentingan pemerintah pusat. Kedua, kepentingan pemerintah daerah. Dilihat dari sisi kepentingan pemerintah pusat sedikitnya ada empat tujuan utama dari kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, meliputi:

²²Damsar, *Pengantar Sosiologi Politik*, edisi revisi (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 45.

²³Syahrir Karim, M.Si., *Politik Desentralisasi: Membangun Demokrasi Lokal* (Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 8.

pendidikan, pelatihan kepemimpinan, menciptakan stabilitas politik, dan mewujudkan demokrasi sistem pemerintahan di daerah. Sementara, bila dilihat dari sisi kepentingan pemerintah daerah; *Pertama*, mewujudkan kesetaraan politik. *Kedua*, menciptakan akuntabilitas lokal. *Ketiga*, mewujudkan responsif lokal.²⁴

Tuntutan pemberian otonomi yang luas kepada daerah kabupaten dan kota seperti ini adalah wajar, paling tidak, untuk dua alasan. *Pertama*, intervensi pemerintahan pusat yang terlalu besar pada masa pemerintahan orde baru telah menimbulkan masalah rendahnya kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah dalam mendorong proses pembangunan dan kehidupan demokrasi di daerah. Arahan dan tuntutan hukum yang terlalu besar dari pemerintah pusat tersebut menyebabkan inisiatif dan prakarsa daerah cenderung mati sehingga pemerintah daerah sering menjadikan pemenuhan peraturan sebagai tujuan, dan bukan sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. *Kedua*, tuntutan otonomi juga muncul sebagai jawaban untuk memasuki era baru yang membawa aturan pada semua aspek kehidupan manusia pada masa yang akan datang. Pada era seperti ini pemerintah semakin kehilangan kendali pada banyak persoalan, seperti perdagangan internasional, informasi, dan ide, serta transaksi keuangan.²⁵ Dimana otonomi daerah berarti kesempatan yang sesuai dengan kebutuhan daerah, membangun sistem dan pola karir politik dan administrasi yang kompetitif, serta mengembangkan sistem manajemen pemerintahan yang efektif, sehingga pada dasarnya untuk memperdayakan daerah termaksud meningkatkan kesejahteraan rakyat.²⁶

²⁴Syahrir Karim, M.Si., *Politik Desentralisasi: Membangun Demokrasi Lokal*, h. 3.

²⁵Mardiansmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah* (Yogyakarta: ANDI, 2004), h. 4.

²⁶Syahrir Karim, M.Si., *Politik Desentralisasi: Membangun Demokrasi Lokal*, h. 13-14.

Teori ini digunakan sebagai pisau analisis dalam melihat pembentukan daerah otonomi baru Kecamatan Sukamaju Selatan di Kabupaten Luwu Utara yang di lakukan pemerintahan daerah dalam urusan penyerahan sebagian wewenang dan tanggungjawab, baik dari segi bentuk, penyelenggaraan dan distribusi kekuasaan yang berada di lokasi penelitian.

2. Elit

Istilah elit berasal dari kata latin “eligere” yang berarti memilih. Dalam pemakaian biasa, kata tersebut berarti “bagian yang menjadi pilihan”. Dalam ilmu sosial, tekanan telah bergeser dari keadaan pilihan menjadi terkemuka. Arti yang paling umum ialah sekelompok orang-orang yang memegang posisi terkemuka dalam suatu masyarakat. Amitai Etzioni mendefinisikan elit sebagai kelompok aktor yang mempunyai kekuasaan termasuk politis. Konteks “bagian yang menjadi pilihan” mengindikasikan bahwa yang menjadi bagian (aktor) merupakan pilihan karena adanya kemampuan tertentu yang membedakannya dengan yang lain.²⁷

Dalam sebuah masyarakat, terdapat sekelompok orang yang dipandang memiliki keahlian dan kecerdasan tertentu. Sekelompok orang ini memiliki penganut dan pengaruh yang cukup besar dalam menggerakkan masyarakat terhadap tujuan tertentu. Dalam studi elit, kelompok elit merupakan kelompok minoritas dimana pengakuan masyarakat terhadap kelebihan dan kecerdasan tertentu yang dimiliki memiliki persyaratan utama. Oleh sebab itu, kelompok elit memiliki status yang

²⁷Prof. Dr. Muh. Irfan Idris, M.Ag. dan Dra. Nila Sastrawati, M.Si., *Sosiologi Politik* (Makassar: Alauddin Press, 2010), h. 68-69.

cukup tinggi di tengah masyarakat sekaligus menjadi pembeda dengan masyarakat biasa lainnya.²⁸

Vifredo Pareto mengatakan bahwa yang disebut dengan kelompok elit adalah sekelompok kecil individu yang memiliki kualitas-kualitas terbaik, yang mendapat menjangkau pusat kekuasaan sosial politik. Elit merupakan orang-orang yang berhasil, yang mampu menduduki jabatan tinggi dalam lapisan masyarakat. Pareto menyakini bahwa elit yang tersebar pada sektor pekerjaan yang berbeda itu umumnya berasal dari kelas yang sama. Yakni orang-orang yang kaya dan pandai. Ia menggolongkan masyarakat ke dalam dua kelas, lapisan atas (elit) dan lapisan bawah (non-elit). Lapisan atas atau kelas elite terbagi dalam dua kelompok, yakni: (1) elit yang memerintah (*governing elite*), dan (2) elit yang tidak memerintah (*non-governing elite*).²⁹

Tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan elit tertentu mampu sedikit banyaknya telah mempengaruhi sebagian sisi kehidupan masyarakat. Kebutuhan akan kehadiran orang-orang dengan kelebihan tertentu memberikan pengaruh terhadap pola pikir, cara pandang dan persepsi masyarakat terhadap sebuah persoalan. Di sisi lain, kehadiran orang-orang pilihan ini menghasilkan perbedaan persepsi pada masyarakat itu sendiri. Dengan menggunakan pendekatan psikologis terhadap berbagai kelompok elit yang berbeda, Pareto mengembangkan konsep “residu” atau kualitas-kualitas yang dapat meningkatkan taraf hidup seseorang. Konsep tersebut didasarkan pada perbedaan antara tindakan yang logis dan non logis (rasional dan

²⁸Prof. Dr. Muh. Irfan Idris, M.Ag. dan Dra. Nila Sastrawati, M.Si., *Sosiologi Politik*, h. 68-69.

²⁹Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Politik* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), h. 40-41.

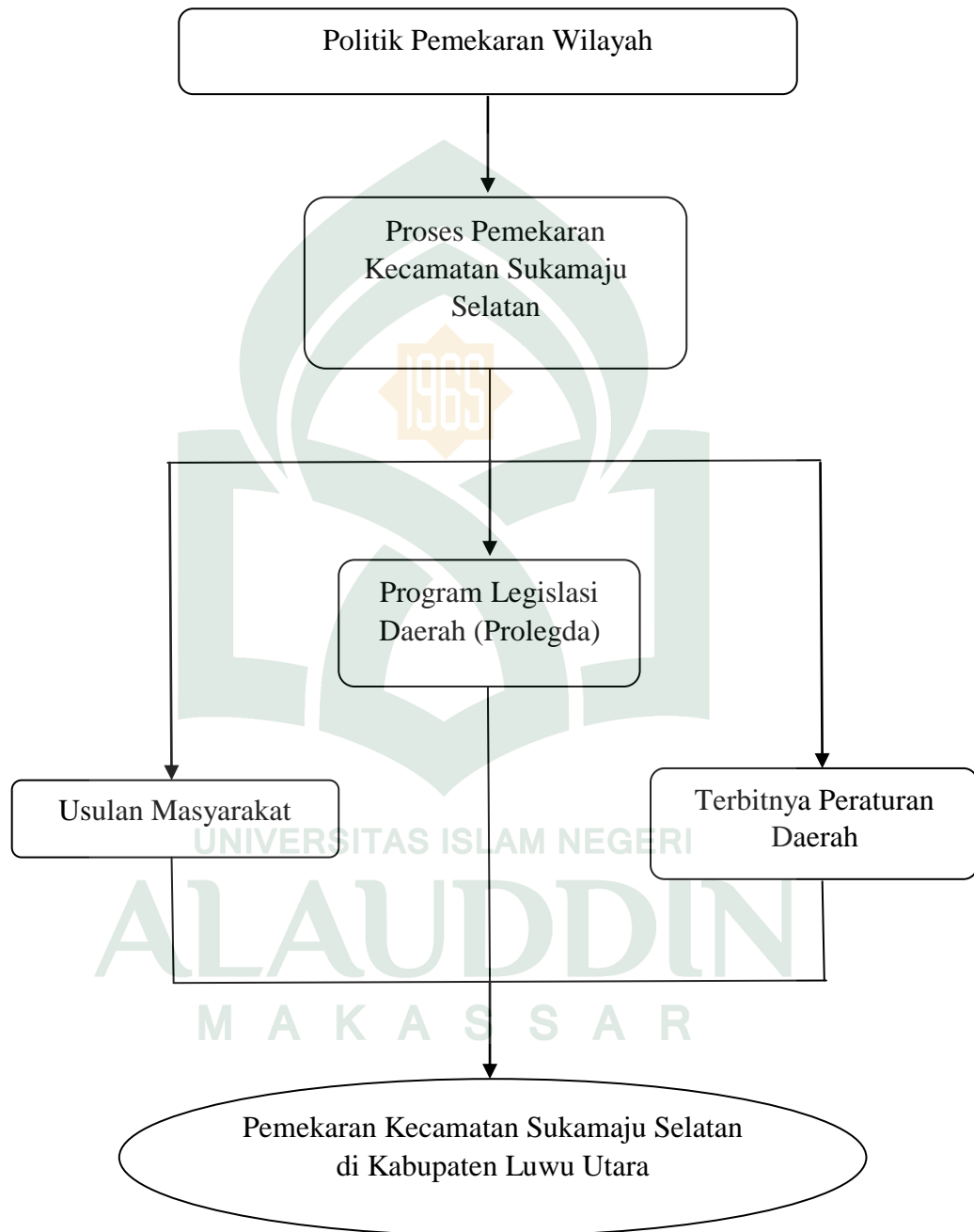
non-rasional). Yang dimaksudkan dengan tindakan yang logis adalah suatu tindakan yang diarahkan pada adanya tujuan yang kemungkinan besar dapat dicapai atau dijangkau. Sedangkan tindakan non logis adalah tindakan yang diarahkan pada suatu tujuan yang pada dasarnya sulit untuk dicapai serta tidak adanya sarana yang memadai untuk melaksanakan usaha tersebut.³⁰

Teori ini digunakan alat untuk menganalisis dinamika aktor elit politik dalam proses pemekaran Kecamatan Sukamaju Selatan di Kabupaten Luwu Utara yang mempunyai pengaruh dalam ruang lingkup pembentukan daerah otonomi baru. Hal ini akan tergambarkan sesuai dengan keadaan dalam lokasi penelitian.



³⁰Prof. Dr. Muh. Irfan Idris, M.Ag. dan Dra. Nila Sastrawati, M.Si., *Sosiologi Politik*, h. 70-71.

B. Kerangka Konseptual



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

Di dalam tulisan ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya. Data yang pasti yang merupakan suatu nilai dibalik data yang tampak. Selanjutnya, penelitian dilakukan pada obyek yang alamiah yaitu obyek yang berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak mempengaruhi obyek tersebut, dan peneliti sebagai instrumen kunci.³¹ Dan tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah membuat fakta mudah dipahami dan jika memungkinkan dapat menghasilkan hipotesis baru.³² Yaitu dalam hal ini peneliti melakukan penelitian terhadap POLITIK PEMEKARAN WILAYAH (Studi Terhadap Pemekaran Kecamatan Sukamaju Selatan di Kabupaten Luwu Utara).

Penerapan metode penelitian kualitatif ini penulis terapkan dalam lokasi penelitian yang dilakukan yaitu Kecamatan Sukamaju, Kecamatan Sukamaju Selatan, Pemerintah Daerah Luwu Utara dan Kantor DPRD Luwu Utara.

B. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan Fenomenologis yang merupakan salah satu pendekatan yang digunakan dalam penelitian kualitatif. Pendekatan ini digunakan dalam penelitian yang mencari arti dari pengalaman kehidupan. Peneliti menghimpun

³¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 8-9.

³²Muriyati Syamsuddin, dkk., *Pedoman Praktis Metodologi Penelitian Internal: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Pengembangan dan Mix Method* (Bandung: Wade Group, 2015), h. 19.

data berkenaan dengan konsep, pendapat, pendirian, sikap, penilaian dan pemberian makna terhadap situasi atau pengalaman dalam kehidupan. Tujuan dari pendekatan ini yaitu untuk menemukan makna dari hal-hal yang esensi atau mendasar dari suatu pengalaman. Pendekatan ini dilakukan melalui wawancara mendalam.³³

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder:

1. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh peneliti yang bersangkutan yang memerlukannya, data primer ini diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara tatap muka dengan informan yang telah dipilih, hasil observasi dari suatu obyek dalam hal ini pemekaran Kecamatan Sukamaju Selatan, dimana peneliti membutuhkan pengumpulan data di lapangan dan disebut juga data asli atau data baru.³⁴
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan oleh peneliti dari media perantara yang secara tidak langsung atau dapat juga disebut sebagai sumber-sumber yang telah ada. Data ini biasanya diperoleh di perpustakaan, laporan-laporan penelitian, media baik cetak maupun elektronik, skripsi, buku dan dapat juga disebut sebagai data yang telah tersedia.³⁵

³³Sukmadinata dan Nana Syauidih, *Metode Penelitian* (Bandung: Rosdakarya, 2006), h. 53.

³⁴Muriyati Syamsuddin, dkk., *Pedoman Praktis Metodologi Penelitian Internal: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Pengembangan dan Mix Method*, h. 72.

³⁵Muriyati Syamsuddin, dkk., *Pedoman Praktis Metodologi Penelitian Internal: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Pengembangan dan Mix Method*, h. 72.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengetahui teknik yang digunakan dalam pengumpulan data. Berikut ini beberapa teknik yang dilakukan dalam penelitian kualitatif yaitu:

1. Observasi

Observasi adalah suatu prosedur pengumpulan data primer yang dilakukan dengan cara melihat, mengamati dan mencatat perilaku dan pembicaraan subyek penelitian dengan menggunakan pedoman observasi.³⁶ Dalam hal ini, penyusun mengunjungi Kecamatan Sukamaju Selatan Kabupaten Luwu Utara terkait dengan pemekaran untuk mengamati langsung berbagai hal atau kondisi yang ada di lapangan.

Observasi dilakukan melalui 3 tahapan, *pertama*, tahap deskripsi yaitu memasuki situasi sosial di mana ada tempat, aktor dan aktifitas. *Kedua*, tahap reduksi yaitu menentukan fokus, memilih di antara yang telah dideskripsikan. *Ketiga*, tahap seleksi yaitu mengurai fokus menjadi komponen yang lebih rinci.³⁷

2. Wawancara

Metode wawancara yang digunakan yaitu wawancara tatap muka (wawancara personal) yang dapat dilakukan dengan cara mendatangi tempat kerja atau tempat tinggal informan. Tipe wawancara tatap muka yang diambil

³⁶Muriyati Syamsuddin, dkk., *Pedoman Praktis Metodologi Penelitian Internal: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Pengembangan dan Mix Method*, h. 55.

³⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, h. 230.

adalah wawancara tatap muka yang terstruktur artinya suatu pertanyaan baku (standar) yang disiapkan sebelumnya dan pewawancara tidak terlalu bebas dalam mengajukan berbagai pertanyaan untuk memperoleh informasi yang diinginkan.³⁸ Peneliti juga menggunakan metode wawancara semiterstruktur yaitu wawancara yang lebih bebas dari wawancara terstruktur yang bertujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana informan diminta pendapat dan ide-idenya. Peneliti mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.³⁹

Berdasarkan beberapa teknik yang digunakan dalam penelitian kualitatif yang telah peneliti pelajari sebelumnya, membuat peneliti memilih informan dengan berdasar pada teknik informan yang ilmiah. Wawancara langsung dilakukan dengan pimpinan dan sejumlah pengurus yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subyek penelitian. Dokumentasi dapat berupa buku harian, surat pribadi, laporan, notulen rapat, catatan kasus dalam pekerjaan sosial, dan dokumen lainnya.⁴⁰ Penelitian yang dilakukan yaitu dengan jalan mengumpulkan dokumen-dokumen pemekaran daerah yang berhubungan dengan penelitian ini.

³⁸Morissa, (Andy Corry W. Dan Farid Hamid U), *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: Kencana, 2012), h. 223.

³⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, h. 233.

⁴⁰Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial: Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011), h. 70-71.

E. Informan

Pada penelitian ini, pemilihan informan didasarkan pada mereka yang betul-betul dianggap memahami permasalahan yang ingin diteliti di lapangan. Informan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Dr. H. Mahfud Yunus, MM (Ketua DPRD Luwu Utara)
2. Rudi Hartono, S.E., M.Si. (Anggota DPRD Luwu Utara Komisi III bagian Ekonomi dan Keuangan)
3. Muhammad Fajar (Camat Sukamaju)
4. Sukma Sabar (Ketua Pemekaran Sukamaju Selatan)
5. Jamingun, S.H. (Tokoh Masyarakat)
6. Drs. H. Muh. Kasrum, M.Si. (Kabag Administrasi Pemerintahan Umum Luwu Utara)
7. Armin, S.Sos. (Kabag Pemerintahan Umum Luwu Utara)
8. Halimun (Tokoh Masyarakat)
9. Musaroji (Tokoh Pemuda)
10. Hardi (Masyarakat)
11. Nasrul (Masyarakat)
12. Umar (masyarakat)
13. Yani (Masyarakat)

F. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri oleh karena itu peneliti sebagai instrumen harus divalidasi sebelum terjun ke lapangan. Menurut Nasution (1998) menyatakan, tidak ada pilihan lain dari pada menjadikan manusia sebagai instrumen penelitian utama. Alasannya

karena segala sesuatunya belum mempunyai bentuk yang pasti, masalah, fokus, prosedur dan hasil penelitian. Dalam keadaan tersebut, tidak ada pilihan lain sehingga peneliti itu sendirilah yang menjadi alat untuk mencapainya.⁴¹

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah suatu metode atau cara untuk mengolah sebuah data menjadi sebuah informasi, sehingga data tersebut menjadi mudah untuk dipahami dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan. Analisis data juga dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk mengubah data hasil dari sebuah penelitian menjadi informasi yang nantinya bisa dipergunakan untuk mengambil sebuah kesimpulan. Tujuan dari teknik analisis data yaitu data bisa mudah dipahami dan dapat menarik kesimpulan. dalam penelitian ini menggunakan teknik penelitian deskriptif untuk mendapatkan hasil dan tujuan sesuai dengan yang diharapkan dan diinginkan.⁴²

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Setelah memilih data mana dan data tersebut dapat dikelompokkan sehingga menjadi jembatan bagi peneliti untuk membuat tema-tema dalam laporan penelitian. Dalam proses pemilihan data, maka akan ada data yang penting dan data yang tidak digunakan.⁴³

⁴¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, h. 223.

⁴²Muriyati Syamsuddin, dkk., *Pedoman Praktis Metodologi Penelitian Internal: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Pengembangan dan Mix Method*, h. 62.

⁴³Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, Edisi Kedua (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2009), h. 150.

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka dilakukan penyajian data dengan tujuan agar lebih mudah dipahami. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya.⁴⁴

3. Verifikasi Data

Langkah analisis ketiga dalam analisis kualitatif yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dari hasil kesimpulan yang didapatkan di lapangan setelah pengumpulan data maka yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel dan bisa menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal namun tidak dipungkiri mungkin juga tidak.⁴⁵



⁴⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, h. 246.

⁴⁵Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, h. 152.

BAB IV

ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kabupaten Luwu Utara

a. Profil Kabupaten Luwu Utara

Kabupaten Luwu Utara adalah Daerah Tingkat II di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibukota kabupaten ini terletak di Masamba. Kabupaten Luwu Utara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1999 merupakan pecahan dari Kabupaten Luwu.⁴⁶ Saat pembentukannya daerah ini memiliki luas 14.447,56 km² dengan jumlah penduduk 442.472 jiwa. Namun setelah dimekarkan menjadi Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2003 maka saat ini luas wilayah Kabupaten Luwu Utara adalah 7.502,58 km².

b. Kondisi Geografis

Kabupaten Luwu Utara pada dasarnya dapat dibagi menjadi 2 wilayah berdasarkan topografinya yaitu wilayah daratan rendah sebanyak 9 kecamatan dengan ketinggian 15-70 mdpl dan dataran tinggi sebanyak 3 kecamatan dengan ketinggian di atas 1000 mdpl, terletak pada posisi 01° 3' 19" – 02° 55' 36" Lintang Selatan dan 119° 47' 46" – 120° 37' 44" Bujur Timur. Wilayah administrasi Kabupaten Luwu Utara terdiri dari 12 wilayah kecamatan:

⁴⁶Dasar Hukum Pembentukan Kabupaten Luwu Utara UU No. 13 Tahun 1999.

Tabel. 1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan.

KECAMATAN	Luas Wilayah Menurut Kecamatan (Km Persegi (Km²)) 2017
Sabbang	525.08
Baebunta	295.25
Malangke	229.7
Malangke Barat	214.05
Limbong	686.5
Seko	2.109.19
Rampi	1.565.65
Masamba	1.068.85
Mappedeceng	275.5
Sukamaju	255.48
Bone-Bone	127.92
Tana Lili	149.41

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Utara

Kabupaten Luwu Utara adalah prodak desentralisasi, dimekarkan dari Kabupaten Luwu pada tahun 1999. Saat ini telah beberapa daerah di Kabupaten Luwu Utara yang telah dimekarkan seperti Kecamatan Malangke menjadi Kecamatan Malangke Barat, Kecamatan Bone-Bone menjadi Kecamatan Tana Lili

dan sekarang Kecamatan Sukamaju telah mekar menjadi Kecamatan Sukamaju Selatan.

Luwu Utara memiliki batas-batas dengan:

- 1) Sulawesi Tengah di Utara;
- 2) Sulawesi Barat dan Tana Toraja di Barat;
- 3) Kabupaten Luwu dan Teluk Bone di Selatan; dan
- 4) Kabupaten Luwu Utara.⁴⁷

2. Kecamatan Sukamaju

a. Keadaan Geografis

Kecamatan Sukamaju secara geografis terletak pada $2^{\circ} 25' 40'' - 2^{\circ} 45' 40''$ Lintang Selatan dan $120^{\circ} 23' 45'' - 120^{\circ} 33' 23''$ Bujur Timur dengan batasnya sebelah selatan yakni Kecamatan Malangeke, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Bone-Bone, sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Mappedeceng, sedangkan sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Luwu Timur, yakni Kecamatan Mangkutana.

Luas wilayah Kecamatan Sukamaju sekitar $255,48 \text{ km}^2$. Desa yang paling luas wilayahnya desa Tamboke dengan luas $63,11 \text{ km}^2$ atau sekitar 24,70 persen dari luas wilayah seluruh desa di Kecamatan Sukamaju. Sedangkan desa yang memiliki wilayah terkecil adalah Wonosari sebesar $0,89 \text{ km}^2$ atau sekitar 0,35 persen dari total wilayah Kecamatan Sukamaju.

Pemerintah Kecamatan Sukamaju membawahi 25 desa, dimana 25 desa diantaranya sudah berstatus desa definitif.⁴⁸

⁴⁷Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu Utara Dalam Angka, *Katalog*, 2017. Di unduh di (<https://luwuutarakab.bps.go.id>) pada tanggal 21 Mei 2018 pukul 14:50 Wita.

Tabel. 2 Luas Wilayah Dan Status Hukum Desa Kecamatan Sukamaju 2016

Desa	Luas Wilayah (Km ²)	Definitif	Persiapan
Subur	5,52	√	-
Lino	10,70	√	-
Paomacang	4,11	√	-
Wonokerto	3,02	√	-
Sumber Baru	2,83	√	-
Banyuwangi	2,19	√	-
Rawamangun	3,98	√	-
Mulyorejo	6,28	√	-
Tolangi	4,52	√	-
Sidoraharjo	2,75	√	-
Sukamukti	3,21	√	-
Sukaharapan	2,68	√	-
Sukadamai	2,14	√	-
Mulyasari	3,65	√	-
Wonosari	0,89	√	-
Sukamaju	4,73	√	-

⁴⁸Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Utara, Kecamatan Sukamaju Dalam Angka, *Katalog*, 2017. Di unduh di (<https://luwuutarakab.bps.go.id>) pada tanggal 21 Mei 2018 pukul 15:11 Wita.

Salulemo	4,10	√	-
Saptamarga	5,67	√	-
Kaluku	20,87	√	-
Tulung Sari	2,27	√	-
Katulungan	3,30	√	-
Tulung Indah	3,52	√	-
Tamboke	63,11	√	-
Minanga Tallu	11,08	√	-
Lampuawa	41,16	√	-

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Utara

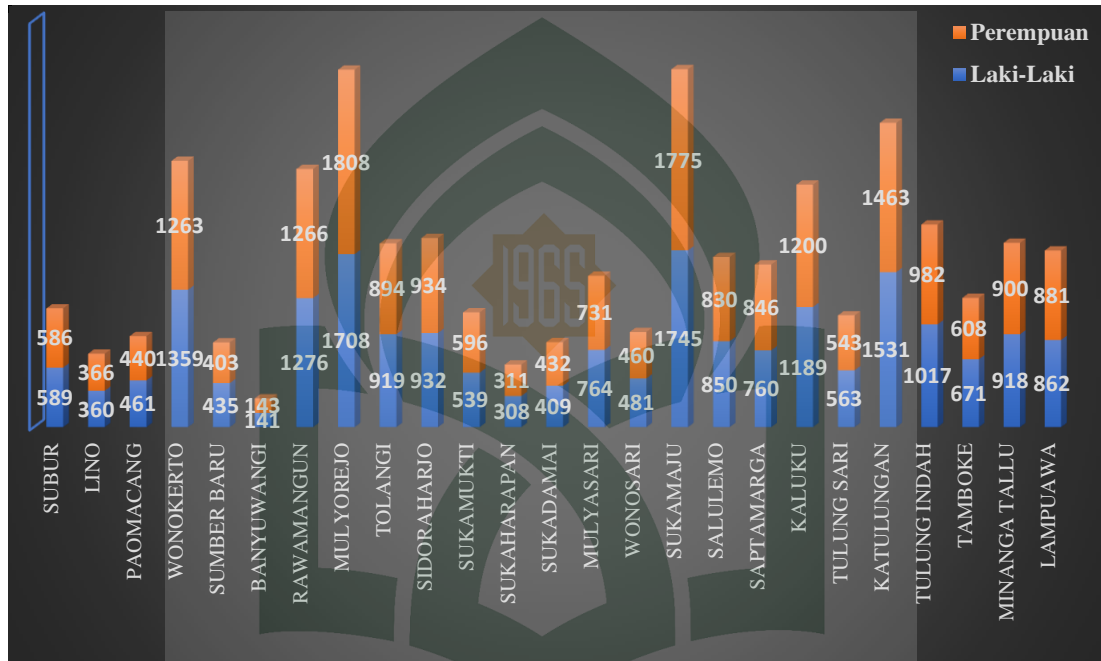
Kecamatan Sukamaju Selatan melalui Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Kecamatan Sukamaju Selatan meliputi beberapa desa yaitu: Desa Subur, Desa Lino, Desa Paomacang, Desa Wonokerto, Desa Sumber Baru, Desa Banyuwangi, Desa Rawamangun, Desa Mulyorejo, Desa Sidoraharjo, Desa Sukamukti dan Desa Sukaharapan. Desa yang paling jauh jarak tempuhnya dibandingkan desa lain di Kecamatan Sukamaju Selatan adalah Desa Lino.

b. Penduduk

Sampai dengan tahun 2016, tingkat kepadatan penduduk di Kecamatan Sukamaju masih tergolong rendah. Dengan luas wilayah 255,48 km² dan jumlah penduduk sebanyak 41.724 orang, maka tingkat kepadatan penduduk di kecamatan ini hanya sebesar 163 orang per km². Dengan kata lain setiap km luas wilayah di Kecamatan Sukamaju secara rata-rata hanya didiami oleh 163 orang. Dari jumlah

penduduk tersebut terdiri dari 20.928 orang laki-laki dan 20.796 orang perempuan.⁴⁹

Gambar. 1 Jumlah Penduduk Kecamatan Sukamaju per Desa Menurut Jenis Kelamin Tahun 2016



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Utara

Berdasarkan tabel diatas jumlah penduduk yang paling banyak berada di Kecamatan Sukamaju Selatan adalah Desa Sukamaju. Khusus untuk Kecamatan Sukamaju Selatan jumlah penduduk yang paling banyak di Desa Mulyorejo.

c. Pendidikan

Sarana pendidikan di Kecamatan Sukamaju telah tersedia secara lengkap dari tingkat pendidikan TK sampai SMA, walaupun masih terbatas. Sarana

⁴⁹Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Utara, Kecamatan Sukamaju Dalam Angka, Katalog, 2017. Di unduh di (<https://luwuutarakab.bps.go.id>) pada tanggal 21 Mei 2018 pukul 15:11 Wita.

pendidikan TK pada tahun 2016 terdiri dari 25 TK Swasta dan 1 TK Negeri. Sarana pendidikan Sekolah Dasar (SD) sebesar 29 SD Negeri dan 1 SD Swasta dan tersebar di hampir semua desa, kecuali di Desa Banyuwangi dan Mulyasari. Untuk tingkat pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) terdapat 7 SMP diantaranya 4 SMP Negeri dan 3 SMP Swasta. Adapun SMP Negeri tersebar di Desa Rawamangun, Sukadamai, Sukamaju, dan Desa Katulungan, sedangkan SMP Swasta tersebar di Desa Wonokerto, Rawamangun, dan Sukamaju. Adapun sarana pendidikan SMA terdapat di Desa Rawamangun, Mulyorejo, dan Sukamaju yang semuanya terdiri dari 3 SMA Negeri dan 2 SMA Swasta.⁵⁰

d. Kesehatan

Dibidang kesehatan, fasilitas dan sarana kesehatan di Kecamatan Sukamaju juga masih sangat terbatas. Untuk melayani 25 desa yang ada hanya terdapat 2 unit puskesmas yaitu di Desa Wonokerto dan Sukamaju. Selain itu, terdapat 7 unit Puskesmas pembantu (pustu), 19 polindes/poskesdes dan 5 tempat praktek dokter yang terletak di Desa Sukamaju dan Wonokerto.⁵¹

e. Keadaan Ekonomi

Pada umumnya sumber ekonomi masyarakat di Kecamatan Sukamaju Selatan menunjukkan bahwa sebagian besar mata pencaharian masyarakat adalah bermata pencaharian sebagai petani, peternakan dan perikanan. Sedangkan sebagian kecil bergerak diberbagai sektor kegiatan dan menekuni usaha seperti

⁵⁰Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Utara, Kecamatan Sukamaju Dalam Angka, *Katalog*, 2017. Di unduh di (<https://luwuutarakab.bps.go.id>) pada tanggal 21 Mei 2018 pukul 15:11 Wita.

⁵¹Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Utara, Kecamatan Sukamaju Dalam Angka, *Katalog*, 2017. Di unduh di (<https://luwuutarakab.bps.go.id>) pada tanggal 21 Mei 2018 pukul 15:11 Wita.

PNS dan pedagang. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa mayoritas penduduk Kecamatan Sukamaju Selatan masih menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian, sementara itu sektor lain hanya sebagian yang menggelutinya seperti pedagang dan pegawai negeri.

Kondisi alam yang subur dan iklim matahari tropis yang sangat menunjang menjadi Kecamatan Sukamaju Selatan sebagai salah satu daerah potensi pertanian di Kabupaten Luwu Utara.⁵²

3. Kecamatan Sukamaju Selatan

a. Sejarah Singkat Kecamatan Sukamaju Selatan

Kecamatan Sukamaju Selatan adalah salah satu pemekaran di Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara. Kecamatan Sukamaju Selatan mekar/memisahkan diri dari Kecamatan Sukamaju tahun 2018. Masa pemerintahan Kecamatan Sukamaju sebagai Kecamatan Induk yang dibentuk sejak tahun 1984 telah berusia 34 tahun.⁵³ Ibukota Kecamatan Sukamaju Selatan berkedudukan di Desa Mulyorejo.⁵⁴ Wilayah Kecamatan Sukamaju Selatan terdiri dari:

- 1) Desa Mulyorejo;
- 2) Desa Rawamangun;
- 3) Desa Paomacang;

⁵²Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Utara, Kecamatan Sukamaju Dalam Angka, *Katalog*, 2017. Di unduh di (<https://luwuutarakab.bps.go.id>) pada tanggal 21 Mei 2018 pukul 15:11 Wita.

⁵³Peraturan Daerah kabupaten Luwu Utara Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Kecamatan Sukamaju selatan, bab III, pasal 5.

⁵⁴Peraturan Daerah kabupaten Luwu Utara Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Kecamatan Sukamaju selatan, bab III, pasal 6.

- 4) Desa Wonokerto;
- 5) Desa Sumberbaru;
- 6) Desa Banyuwangi;
- 7) Desa Subur;
- 8) Desa Lino;
- 9) Desa Sidoraharjo;
- 10) Desa Sukamukti; dan
- 11) Desa Sukaharapan.⁵⁵

Adapun jumlah penduduk Kecamatan Sukamaju Selatan berjumlah 20.658 jiwa setelah dipisahkan dari jumlah penduduk Kecamatan Sukamaju sebagai kecamatan induk yang berjumlah 50.583 jiwa.⁵⁶

b. Kondisi Geografis

Secara geografis Kecamatan Sukamaju Selatan memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- 1) Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Sukamaju;
- 2) Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Bone-Bone;
- 3) Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Malangke; dan
- 4) Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Mappedeceng.⁵⁷

⁵⁵Peraturan Daerah kabupaten Luwu Utara Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Kecamatan Sukamaju selatan, bab V, pasal 11.

⁵⁶Peraturan Daerah kabupaten Luwu Utara Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Kecamatan Sukamaju selatan, bab III, pasal 7.

⁵⁷Peraturan Daerah kabupaten Luwu Utara Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Kecamatan Sukamaju selatan, bab IV, pasal 9.

Adapun luas wilayah Kecamatan Sukamaju Selatan adalah seluas ± 328 km² sebagaimana tercantum dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah.⁵⁸

B. Pengkajian Syarat Teknis Pemekaran Kecamatan Sukamaju Selatan

Setelah mendapat hasil musyawarah yang dilakukan kepala desa dan badan musyawarah desa yang mendukung pembentukan Kecamatan Sukamaju Selatan, bersama perangkat desa lainnya dan tokoh masyarakat pada tanggal 01 Desember 2014 maka dibuatlah proposal atau permohonan usulan pemekaran kecamatan tersebut kepada pemerintah Kabupaten Luwu Utara untuk memenuhi keinginan masyarakat. Dalam tahap pengajuan proposal pembentukan kecamatan tidak terlepas dari Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan. Pada pengkajian ini lebih menekankan pada syarat teknis pemekaran kecamatan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008, sedangkan syarat administratif dan syarat fisik kewilayahan hanya dibahas secara umum. Dalam syarat teknis, harus menguraikan lima faktor dan dua puluh indikator, selanjutnya masing-masing faktor dalam indikator tersebut akan dibahas dan dikaitkan dengan situasi dan kondisi riil yang ada di Kabupaten Luwu Utara, sebagai bahan kajian untuk mendukung proses pemekaran Kecamatan Sukamaju Selatan di Kabupaten Luwu Utara.

1. Pengkajian Syarat Administratif Pemekaran Sukamaju Selatan

Berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten dan kota untuk mengurus rumah tangga pemerintahannya sendiri dalam rangka meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan memaksimalkan

⁵⁸Peraturan Daerah kabupaten Luwu Utara Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Kecamatan Sukamaju selatan, bab IV, pasal 10.

pelayanan kepada masyarakat, maka mendorong pemerintah Kabupaten Luwu Utara untuk melakukan pemekaran terhadap beberapa kecamatan, yang menurut peraturan perundang-undangan memang layak untuk dimekarkan.

Untuk selanjutnya dalam pasal 4 disebutkan bahwa Syarat Administratif pembentukan kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, meliputi:

- a. Batas usia peneyelenggaraan pemerintahan minimal 5 (lima) tahun;
- b. Batas usia penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan yang akan dibentuk menjadi kecamatan minimal 5 (lima) tahun;
- c. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau nama lain untuk Desa dan Forum Komunikasi Kelurahan atau nama lain untuk kelurahan diseluruh wilayah kecamatan baik yang menjadi calon cakupan wilayah kecamatan baru maupun kecamatan induk tentang persetujuan pembentukan kecamatan;
- d. Keputusan Kepala Desa atau nama lain untuk desa dan Keputusan Lurah atau nama lain untuk kelurahan di seluruh wilayah kecamatan baik yang akan menjadi cakupan wilayah kecamatan baru maupun kecamatan induk tentang persetujuan pembentukan kecamatan;
- e. Rekomendasi Gubernur.⁵⁹

Berdasarkan data yang diperoleh dilapangan yakni berupa data sekunder, bahwa persyaratan administratif yang disyaratkan untuk memekarkan Kecamatan Sukamaju Selatan sudah terpenuhi.

⁵⁹Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan, bab II, pasal 4.

2. Pengkajian Syarat Teknis Pemekaran Kecamatan Sukamaju Selatan

Syarat Teknis untuk pemekaran kecamatan meliputi faktor-faktor sebagai berikut:

- a. Jumlah penduduk;
- b. Luas wilayah;
- c. Rentang kendali penyelenggaraan pelayanan pemerintahan;
- d. Aktivitas perekonomian;
- e. Ketersediaan sarana dan prasarana.⁶⁰

Berdasarkan deskripsi faktor dan indikator dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008, Kecamatan Sukamaju Selatan dinyatakan layak untuk dimekarkan.

3. Pengkajian Syarat Fisik kewilayahan Pemekaran Kecamatan Sukamaju Selatan

Syarat Fisik Kewilayahan sebagaimana yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 pada Pasal 5 meliputi cakupan wilayah, lokasi calon ibukota, sarana dan prasarana pemerintahan. Dan selanjutnya syarat tersebut dijelaskan lagi pada Pasal 6 sebagai berikut:

- a. Cakupan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk daerah kabupaten paling sedikit terdiri atas 10 desa/kelurahan dan untuk daerah kota paling sedikit terdiri atas 5 desa/kelurahan;

⁶⁰Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan, bab II, pasal 7.

- b. Lokasi calon ibukota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 memperhatikan aspek tata ruang, ketersediaan fasilitas, aksesibilitas, kondisi dan letak geografis, kependudukan, sosial ekonomi, sosial politik dan sosial budaya;
- c. Sarana dan prasarana pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi bangunan dan lahan untuk kantor camat yang dapat digunakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.⁶¹

Jika ditinjau dari syarat cakupan wilayah, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008, Kecamatan Sukamaju Selatan sudah memenuhi persyaratan untuk menjadi kecamatan sendiri, karena kecamatan tersebut memiliki jumlah desa yang lebih dari yang disyaratkan yakni 10 desa.

C. Latar Belakang Munculnya Isu Pemekaran Kecamatan Sukamaju Selatan

Kecamatan adalah pembagian wilayah administrasi di Indonesia dibawah kabupaten atau kota. Kecamatan terdiri atas desa-desa atau kelurahan-kelurahan. Kecamatan adalah satu organisasi atau lembaga pada pemerintahan daerah yang bertanggung jawab kepada kepala daerah dan membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan kebutuhan daerah. Salah satu cara untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat tersebut adalah dengan pemekaran kecamatan dengan melihat kenyataan bahwa pelaksanaan berpengaruh baik atau buruk terhadap peningkatan pelayanan.⁶²

⁶¹Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan, bab II, pasal 6.

⁶²Imanuel, "Studi Tentang Proses Pemekaran Kecamatan Malinau Selatan Menjadi Tiga Kecamatan Kabupaten Malinau", *eJurnal Pemerintahan Integratif* 4, no. 2 (2016): h. 1.

Era Reformasi sejak Mei 1998 membawa harapan baru bagi masyarakat Indonesia dalam proses otonomi daerah, karena dengan reformasi suara dan peran masyarakat menjadi syarat utama untuk keberkelanjutan suatu proses pemekaran wilayah yang dalam asas demokratisasi. Hal ini sesuai dengan hakekat pemekaran wilayah yang berorientasi pada peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, peran masyarakat dalam bentuk usulan menjadi pertimbangan utama untuk menentukan pilihan perlu atau tidaknya dilakukan pemekaran wilayah. Selain itu lembaga-lembaga atau organisasi masyarakat juga harus berperan dalam memberdayakan masyarakat supaya ada pengertian yang baik tentang keuntungan dan kelemahan pemekaran wilayah. Dengan demikian, dalam tahap awal atau masa persiapan, kegiatan yang harus dilaksanakan pertama kali adalah melakukan penjangkaran aspirasi masyarakat.⁶³ Pembentukan Kecamatan Sukamaju Selatan secara umum murni diprakarsai dari usulan masyarakat di Kecamatan Sukamaju yaitu terdiri dari 7 (tujuh) Desa dan yang diketuai oleh Sukma Sabar yang berasal dari Desa Sukamaju Kecamatan Sukamaju yaitu:

Tabel. 3 Desa yang memprakarsai pemekaran tahun 2002

NO	Nama Desa	Jumlah Penduduk	Luas Wilayah (Km ²)
1	Desa Lino	726	10,70
2	Desa Subur	1.175	5,52
3	Desa Mulyorejo	3.516	6,28

⁶³Ariandi Zulkarnain, "Dinamika Proses Pemekaran Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2008-2012", *Tesis* (Pekanbaru: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2012), h. 7.

4	Desa Banyuwangi	2.542	2,19
5	Desa Wonokerto	2.622	3,02
6	Desa Sidoraharjo	1.866	2,75
7	Desa Paomacang	901	4,11

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Utara

Berdasarkan tabel diatas pembentukan kecamatan yang digagas oleh 7 Desa di Kecamatan Sukamaju Selatan diantaranya Desa Lino, Desa Subur, Desa Wonokerto, Desa Paomacang, Desa Mulyorejo, Desa Sidoraharjo dan Desa Banyuwangi.⁶⁴

Adapun desa-desa yang berada diluar pemekaran Kecamatan Sukamaju Selatan adalah:

Tabel.4 Desa yang diluar pemekaran Kecamatan Sukamaju Selatan 2002.

NO	Nama Desa	Jumlah Penduduk	Luas Wliyah (Km ²)
1	Desa Tolangi	1.813	4,52
2	Desa Sukadamai	841	2,14
3	Desa Mulyasari	1.495	3,65
4	Desa Wonosari	941	0,89
5	Desa Sukamaju	3.520	4,73
6	Desa Salulemo	1.680	4,10
7	Desa Saptamarga	1.606	5,67

⁶⁴Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Utara, Kecamatan Sukamaju Dalam Angka, *Katalog*, 2017. Di unduh di (<https://luwuutarakab.bps.go.id>) pada tanggal 21 Mei 2018 pukul 15:11 Wita.

8	Desa Kaluku	2.389	20,87
9	Desa Tulung Sari	1.106	2,27
10	Desa Katulungan	2.994	3,30
11	Desa Tulung Indah	1.999	3,52
12	Desa Tamboke	1.279	63,11
13	Desa Minanga Tallu	1.818	11,08
14	Desa Lampuawa	1.743	41,16

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Utara

Berdasarkan tabel diatas merupakan desa-desa yang diluar pemekaran Kecamatan Sukamaju Selatan. Desa Tolangi, Desa Sukadamai, Desa Mulyasari, Desa Wonosari, Desa Sukamaju, Desa Salulemo, Desa Saptamarga, Desa Kaluku, Desa Tulung Sari, Desa Katulungan, Desa Tulung Indah, Desa Tamboke, Desa Minanga Tallu, Desa Lampuawa merupakan desa-desa yang berada kecamatan sebelumnya yaitu Kecamatan Sukamaju Selatan.⁶⁵

Latar belakang munculnya isu pemekaran Kecamatan Sukamaju Selatan karena melalui tuntutan masyarakat yaitu:

1. Pelayanan publik, dimana masyarakat menginginkan adanya kemudahan dalam urusan pelayanan, baik dalam urusan administrasi dan

⁶⁵Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Utara, Kecamatan Sukamaju Dalam Angka, *Katalog*, 2017. Di unduh di (<https://luwuutarakab.bps.go.id>) pada tanggal 24 Juli 2018 pukul 06:57 Wita.

kependudukan maupun dalam bentuk efisiensi rentang kendali wilayah guna efektifitas pelayanan publik;

2. Jarak tempuh yang jauh, dimana masyarakat mengeluh akan jarak antara ibukota kecamatan dengan desa terutama Desa Lino yang menempuh waktu kurang lebih dari 3 jam untuk ke ibukota kecamatan;
3. Dengan adanya pemekaran daerah baru sehingga dapat pemeratakan pembangunan (ekonomi) masyarakat dan sebagainya;
4. Dan lain-lain.

Pada dasarnya wacana pemekaran Kecamatan Sukamaju Selatan diawali pada tahun 2002 dan berawal dari inisiatif masyarakat dan tokoh masyarakat menginginkan adanya perubahan dalam aspek pelayanan publik, pemerataan pembangunan (ekonomi) dan sebagainya. Berdasarkan wawancara dengan saudara Nasrul sebagai masyarakat menegaskan bahwa:

*“Dengan terbentuknya Kecamatan Sukamaju Selatan mampu dapat mengubah keluhan kesah masyarakat selama ini, melihat jarak tempuh yang begitu jauh (terkhusus Desa Lino) dari ibukota kecamatan yaitu Desa Sukamaju untuk urusan pelayanan, pemasaran prodak pertanian, pembangunan (ekonomi) lebih baik lagi dan membawa dampak positif untuk masyarakat sendiri”.*⁶⁶

Hal senada diperkuat oleh Musaroji sebagai Tokoh Pemuda:

“Alasan mendasar usulan masyarakat dalam pemekaran Kecamatan Sukamaju Selatan adalah dikarenakan jarak tempuh yang letaknya cukup jauh dari induk kecamatan dan kondisi jalan yang kurang baik sehingga memakan waktu yang begitu lama. Seperti halnya di Desa Lino, untuk menuju ke induk kecamatan perlu waktu lebih dari 3 jam perjalanan dan

⁶⁶Nasrul, Umur 30 tahun (Masyarakat Desa Sukamukti Kecamatan Sukamaju Selatan). Wawancara, rumah informan pada tanggal 21 April 2018, 17:32 Wita.

*melalui jalan yang berbatu, berlubang dan apabila hujan lubang jalan tersebut penuh dengan genangan air, dan itu membuat resah khususnya di Desa Lino”.*⁶⁷

Dari penjelasan wawancara diatas usulan masyarakat tentang pembentukan pemekaran Kecamatan Sukamaju Selatan, dengan terbentuknya Kecamatan Sukamaju Selatan mampu mempermudah masyarakat dalam urusan pelayanan, baik dalam urusan administrasi dan kependudukan maupun dalam bentuk efesiensi rentang kendali wilayah guna efektifitas pelayanan publik maupun dalam pertumbuhan pembangunan (ekonomi). Perwujudan otonomi masyarakat kecamatan adalah suatu proses peningkatan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi menuju kehidupan masyarakat kecamatan yang diatur dan digerakkan oleh masyarakat dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat. Ini berarti otonomi masyarakat kecamatan adalah demokrasi, jadi otonomi masyarakat tidak mungkin terwujud tanpa demokrasi.⁶⁸

Berdasarkan wawancara dengan saudara Hardi sebagai masyarakat:

*“Pada dasarnya pemekaran Kecamatan Sukamaju Selatan dikarenakan kami menginginkan adanya perubahan tata kelola hidup baik dari segi pengurusan administrasi kependudukan dan lain-lain, sehingga kami menginginkan ibukota kecamatan tidak terlalu jauh dari ibukota kecamatan sebelumnya, agar masyarakat lain juga lebih dekat jangkauannya dengan pemerintahan kecamatan nantinya”.*⁶⁹

⁶⁷Musaroji, Umur 55 tahun (Tokoh Pemuda). *Wawancara*, rumah informan di Desa Mulyorejo Kecamatan Sukamaju Selatan Kabupaten Luwu Utara pada tanggal 21 April 2018, 16:07 Wita.

⁶⁸Tri Banjir Adi Wijoyo, “Pemekaran Desa Ditinjau Dari aspek Otonomi Daerah di Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur (Studi Kasus di Desa Wanasari), *Skripsi* (Makassar: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2013), h. 5-7.

⁶⁹Hardi, Umur 31 tahun (Masyarakat Desa Sidoraharjo Kecamatan Sukamaju Selatan). *Wawancara*, rumah informan pada tanggal 21 April 2018, 16:03 Wita.

Hal senada juga diperkuat oleh Jamingun, S.H. sebagai Tokoh Masyarakat, mengatakan bahwa:

*“Pemekaran Kecamatan Sukamaju Selatan pada dasarnya berawal dari inisiatif masyarakat, alasan masyarakat ingin pemekaran dikarenakan Kecamatan induk sebelumnya yaitu Kecamatan Sukamaju memiliki 25 desa, hal tersebut semakin membuat beratnya tugas yang harus ditanggung pemerintah Kecamatan Sukamaju terkait mengurus urusan administrasi kependudukan dan pelayanan kepada masyarakat dari 25 desa tersebut. Selain itu sebagian dari desa-desa yang ada letaknya cukup jauh dari pusat pemerintahan Kecamatan Sukamaju dan ditambah lagi dengan kondisi jalan yang kurang baik yang membuat waktu perjalanan dari desa-desa tersebut ke pusat pemerintahan kecamatan memakan waktu yang cukup lama, sehingga masyarakat mengusulkan suatu pemekaran Kecamatan Sukamaju Selatan agar mereka merasa lebih dekat jangkauannya dengan pemerintahan kecamatan yang dimekarkan”.*⁷⁰

Berdasarkan hasil wawancara diatas, pemekaran wilayah adalah terjadinya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, adanya proses demokratisasi yang mendorong masyarakat untuk lebih berani mengemukakan aspirasinya sebagai wujud kepentingan mereka dalam proses demokrasi. Salah satu aspirasi masyarakat adalah keinginan membentuk kecamatan baru.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sisten Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan daerah otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan

⁷⁰Jamingun, S.H., Umur 50 tahun (Tokoh Masyarakat). *Wawancara*, rumah informan di Desa Sidoraharjo Kecamatan Sukamaju Selatan Kabupaten Luwu Utara pada tanggal 27 Maret 2018, 12.03 Wita.

masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁷¹ Berangkat dari wawancara dengan Halimun sebagai Tokoh Masyarakat bahwa:

*“Pada hakekatnya, melalui otonomi daerah, membuat daerah dan masyarakatnya lebih berdaya sehingga kebergantungan kepada pemerintah pusat berkurang. Tuntutan yang selalu muncul disetiap daerah yang terisolir yaitu mendapatkan pelayanan yang baik. Seiring dengan hal tersebut dan menyikapi berbagai tuntutan dan aspirasi dari masyarakat, maka setiap daerah di Indonesia kini melakukan pembenahan melalui otonomi dimasing-masing daerah khususnya Kecamatan Sukamaju Selatan dengan inisiatif pembentukan daerah otonomi baru. Tujuan utama daerah adalah peningkatan kesejahteraan rakyat”.*⁷²

Selain itu, dari pihak Camat Sukamaju, Muhammad Fajar, S.P. mengatakan:

*“Latar belakang dari muncul isu pemekaran ini adalah kami melihat masyarakat membutuhkan adanya pelayanan yang begitu baik maupun dalam efesiensi rentang kendali wilayah guna efektifitas pelayanan publik”.*⁷³

Dari hasil wawancara di atas, dijelaskan bahwa latar belakang pembentukan kecamatan pada dasarnya adalah pertimbangan masyarakat sendiri, yang kesulitan dalam efektifitas pelayanan publik. Teori Desentralisasi menjelaskan bahwa tuntutan pemberian otonomi yang luas kepada masyarakat yaitu arahan dan tuntutan hukum yang terlalu besar dari pemerintah pusat tersebut menyebabkan inisiatif dan prakarsa daerah cenderung mati sehingga pemerintah daerah sering menjadikan pemenuhan

⁷¹Imanuel, “Studi Tentang Proses Pemekaran Kecamatan Malinau Selatan Menjadi Tiga Kecamatan Kabupaten Malinau”, *eJurnal Pemerintahan Integratif* 4, no. 2 (2016): h. 2.

⁷²Halimun, Umur 52 tahun (Tokoh Masyarakat). *Wawancara*, rumah informan di Desa Mulyorejo Kecamatan Sukamaju Selatan Kabupaten Luwu Utara pada tanggal 21 April 2018, 14:51 Wita.

⁷³Muhammad Fajar, S.P., Umur 50 tahun (Camat Sukamaju). *Wawancara*, di Kantor Camat Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara pada tanggal 27 Maret 2018, 10:25 Wita.

peraturan sebagai tujuan, bukan sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dimana otonomi daerah berarti memberi kesempatan yang sesuai dengan kebutuhan daerah, membangun sistem dan pola pikir politik dan administrasi yang komfertif, serta mengembangkan sistem manajemen pemerintahan yang efektif, sehingga pada dasarnya memperdayakan daerah termaksud meningkatkan kesejahteraan rakyat.

D. Proses Pemekaran Kecamatan Sukamaju Selatan

1. Usulan Masyarakat

Pada tahun 2002 wacana pembentukan Kecamatan Sukamaju Selatan dimulai, dalam prosesnya terdapat kepentingan dalam penentuan daerah persiapan oleh tim penyusun pemekaran. Sekelompok masyarakat menginginkan daerah ibukota berada di daerah Desa Kaluku, namun melihat hal itu menambah beban masyarakat dan tokoh masyarakat karena jarak tempuh yang semakin jauh dari yang sebelumnya yaitu berada di Desa Sukamaju, dikarenakan pembentukan pemekaran kecamatan ini diharapkan lebih meningkatkan pelayanan yang lebih efektif dan jarak tempuh yang lebih dekat dari sebelumnya. Berangkat dari hasil wawancara dengan Sukma Sabar sebagai Ketua Pemekaran Sukamaju Selatan, mengatakan bahwa:

“Awal wacana pemekaran ini diawali pada tahun 2002, kami melakukan perbincangan mengenai pemekaran kecamatan antara masyarakat dan tokoh masyarakat. Namun dari pihak sekelompok masyarakat melakukan kepentingan politik sehingga saya pada saat itu melakukan pemberhentian untuk sementara waktu mengenai usulan pemekaran. Setelah berjalannya waktu saya memberikan mereka pemahaman bahwa pemekaran ini semata-mata untuk mempermudah masyarakat Kecamatan Sukamaju Selatan dalam urusan pelayanan publik, pembangunan dan ekonomi di karenakan

*melihat jarang tempuh yang begitu jauh dan infrastruktur yang tidak memadai”.*⁷⁴

Selain itu, hal yang sama juga disampaikan oleh Drs. H. Muh. Kasrum, M.Si. sebagai Kabag Administrasi Pemerintahan Umum:

*“Kepentingan elit terjadi dikarenakan masyarakat Desa Kaluku menginginkan induk kecamatan berada di Desa Kaluku, namun bupati tidak setuju di karenakan semakin jauhnya jarak tempuh yang bakal di lalui oleh masyarakat yang terisolir. Dimana bupati menginginkan induk kecamatan berada di Desa Mulyorejo karena dianggap pelayanan lebih dekat dengan desa-desa yang tergabung dalam Kecamatan Sukamaju Selatan”.*⁷⁵

Berdasarkan hasil wawancara diatas, pada umunya dengan melakukan musyawarah kembali terhadap masyarakat yang berada di Desa Kaluku dengan memberikan pemahaman yang baik, sehingga usulan pemekaran Kecamatan Sukamaju Selatan bisa dilanjutkan kembali pada tahun 2014. Pada dasarnya telah mengajukan surat kepada pemerintah Kecamatan Sukamaju Selatan, dimana surat tersebut mewakili masing-masing Kepala Desa, Tokoh Masyarakat, Masyarakat, Ketua BPD se-Kecamatan Sukamaju. Berangkat dari hasil wawancara dengan Camat Sukamaju, mengatakan bahwa:

“Sehubungan dengan menindak lanjuti aspirasi masyarakat Sukamaju bagian selatan untuk membentuk kecamatan terpisah dari kecamatan induk, maka kami beberapa tokoh masyarakat yang bergabung dalam Tim Penggagas Pembentukan kecamatan mengadakan musyawarah di Kantor Kepala Desa Wonokerto pada hai senin tanggal 01 Desember 2014. Dan

⁷⁴Sukma Sabar, Umur 50 tahun (Ketua Pemekaran Sukamaju Selatan). Wawancara, rumah informan di Desa Sukamaju Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara pada tanggal 27 Maret 2018, 10:46 Wita.

⁷⁵Drs. H. Muh. Kasrum, M.Si., Umur 48 tahun (Kabag Administrasi Pemerintahan Umum). Wawancara, di kantor Kabag Administrasi Pemerintahan Umum Luwu Utara pada tanggal 03 April 2018, 15:06 Wita.

*syarat pemekaran untuk dimekarkan Kecamatan Sukamaju sangat memenuhi syarat, baik itu syarat administratif, syarat teknis dan syarat fisik kwilayahan”.*⁷⁶

Setelah mendapat hasil musyawarah yang dilakukan kepala desa dan badan musyawarah desa yang mendukung pembentukan Kecamatan Sukamaju Selatan, bersama perangkat desa lainnya dan tokoh masyarakat pada tanggal 01 Desember 2014 maka dibuatlah proposal atau permohonan usulan pemekaran kecamatan tersebut kepada pemerintah Kabupaten Luwu Utara untuk memenuhi keinginan masyarakat. Dalam tahap pengajuan proposal pembentukan kecamatan tidak terlepas dari Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan. Pada pengkajian ini lebih menekankan pada syarat teknis pemekaran kecamatan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008, sedangkan syarat administratif dan syarat fisik kewilayahan hanya dibahas secara umum.

Namun dalam proses pemekaran ini terdapat kepentingan-kepentingan yang diinginkan oleh ketua pemekaran dalam mengambil jabatan nantinya setelah terbentuknya kecamatan baru. Berdasarkan dari hasil wawancara yang langsung dikatakan oleh Sukma Sabar sebagai Ketua Pemekaran Kecamatan Sukamaju Selatan:

“Dalam proses pemekaran Kecamatan Sukamaju Selatan ini yang menjadi persoalan sekarang adalah bermunculannya mereka-mereka yang seakan menjadi pahlawan dalam terbentuknya Kecamatan Sukamaju Selatan. Seperti saya tidak ada faktor lain dalam terbentuknya kecamatan ini, tapi walaupun nanti saya maju menjadi camat atau wakil camat saya tidak

⁷⁶Muhammad Fajar, S.P., Umur 50 tahun (Camat Sukamaju). Wawancara, di Kantor Camat Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara pada tanggal 27 Maret 2018, 10:25 Wita.

*memanfaatkan kesempatan ini, dalam rejeki kita tidak tahu nantinya bagaimana”.*⁷⁷

Dari hasil wawancara diatas, dengan melihat perkataan yang ucapkan secara langsung oleh Sukma Sabar selaku Ketua Pemekaran menandakan adanya kepentingan-kepentingan politik dalam terbentuknya Kecamatan Sukamaju Selatan yang diinginkan olehnya.

Beberapa alasan yang kemudian menjadi tujuan dalam pemekaran wilayah antara lain: masyarakat menginginkan pelayanan publik yang lebih baik dan lebih mudah serta pemerataan pembangunan, tujuan ingin mendapatkan anggaran dana yang akan sangat mendukung kelancaran proses pemerataan pembangunan di segala aspek, pemekaran diharapkan mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi penduduk setempat, dan penyerapan tenaga kerja secara lebih luas di sektor pemerintahan. Keluhan masyarakat tentang pemekaran Kecamatan ini bukan hal baru dalam pemekaran wilayah, karena ini juga merupakan keluhan beberapa masyarakat di daerah-daerah yang sedang melakukan pemekaran di Indonesia.

2. Program Legislasi Daerah (Prolegda)

Didasari dari permohonan masyarakat melalui musyawarah yang telah mengajukan proposal pembentukan Kecamatan Sekamaju Selatan ke pihak kecamatan yang pada akhirnya diproses oleh pemerintah dan dilaporkan DPRD Luwu Utara. Usulan warga tersebut telah dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dan telah masuk Program Legislasi Daerah (Prolegda) Luwu Utara 2017. Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Luwu Utara, Sulawesi-Selatan yang

⁷⁷Sukma Sabar, Umur 50 tahun (Ketua Pemekaran Sukamaju Selatan). *Wawancara*, rumah informan di Desa Sukamaju Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara pada tanggal 27 Maret 2018, 10:46 Wita.

membahas mengenai Ranperda pembentukan Kecamatan Sukamaju Selatan. Pansus II yang diketahui Aris Mustamin melakukan konsultasi ke Kemendagri di Jakarta, melalui pembahasan mengenai pembentukan daerah persiapan sebagaimana dimaksud harus memenuhi persyaratan dasar dan persyaratan administratif pemekaran kecamatan. Salah satu membantu mempercepat proses pemekaran Kecamatan Sukamaju Selatan yaitu H.M Lutfhi Andi Mutty sebagai Anggota DPR-RI DAPIL SULSEL III. Nampaknya salah satu Anggota DPR-RI yaitu Lutfhi Andi Mutty memiliki kepentingan didalam proses pemekaran wilayah ini, adanya kecenderungan ingin memiliki jabatan pemerintah yang lebih tinggi lagi dan mengambil kesempatan dalam menguasai masyarakat dalam pemilihan ataupun sebagainya.

H.M Lutfhi Andi Mutty merupakan Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dari partai Nasional Demokrat (Nasdem) mewakili Dapil Sulawesi Selatan III. Lutfhi Andi Mutty adalah merupakan tokoh Tana Luwu dan sekaligus Lutfhi Andi Mutty merupakan tokoh politik yang berasal di tanah kelahirannya yaitu Masamba Kabupaten Luwu Utara. Lutfhi Andi Mutty adalah mantan Bupati Luwu Utara dua periode (1999-2004 dan 2004-2009). Pada 2009 beliau bertugas menjadi Staf Khusus Wakil Presiden Budiono. Di periode 2014-2019 ini Lutfhi Andi Mutty bertugas di Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI dan juga di Komisi II yang membidangi Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Aparatur dan Reformasi Birokrasi, Kepemiluan, Pertahanan dan Reforma Agrari.⁷⁸

Namun hambatan yang dilalui pada tahun 2017 tentang pemekaran daerah di Kabupaten Luwu Utara yaitu diberitahukannya pemerintah Kabupaten Luwu

⁷⁸<http://wikidpr.org/anggota/> (2 Juni 2018).

Utara dengan adanya moratorium pemekaran daerah di tahun 2017 oleh Gubernur Sulawesi Selatan. Berangkat dari hasil wawancara dengan Armin, S.Sos. sebagai Kabag Pemerintahan Umum Kabupaten Luwu Utara:

“Melalui kebijakan, Gubernur Sulawesi Selatan dengan adanya moratorium pemekaran daerah pada tahun 2017. Namun melalui aspirasi masyarakat yang menginginkan adanya efektifitas peningkatan pelayanan publik, percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi, percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah, percepatan pengelolaan potensi daerah, peningkatan keamanan dan ketertiban, dan peningkatan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah. Usulan warga tersebut telah masuk Program Legislasi Daerah Luwu Utara (Prolegda), dan sempat kembali terhenti. Namun dengan melihat dan mengangkat kembali usulan pemekaran ini dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 403 Tentang pemerintahan Daerah”.⁷⁹

UU 23 Tahun 2014 Pasal 403:

“Semua ketentuan mengenai program legislasi daerah dan badan legislasi daerah yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku harus dibaca dan dimaknai sebagai program pembentukan Perda dan badan pembentukan Perda, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini”.⁸⁰

Dari hasil wawancara diatas, dengan masuknya Rancangan Peraturan Daerah pada tahun 2017, pemerintah dapat menuruskan usulan pemekaran daerah di Kabupaten Luwu Utara dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah.

⁷⁹Armin, S.Sos., Umur 54 tahun (Kabag Pemerintahan Umum Luwu Utara). Wawancara, di Kantor Kabag Pemerintahan Umum Luwu Utara pada tanggal 03 April 2018, 14:21 Wita.

⁸⁰Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, bab XXVII, pasal 403.

Tuntutan yang melatarbelakangi pemekaran ini adalah mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, pertumbuhan ekonomi, pembangunan dan pemeratakan keadilan artinya pemekaran Kecamatan Sukamaju Selatan ini diharapkan penyerapan tenaga kerja secara lebih luas di sektor pemerintah dan bagi-bagi kekuasaan dibidang politik dan pemerintahan. Kenyataan politik seperti juga mendapat dukungan dari masyarakat setempat khususnya Kecamatan Sukamaju Selatan, karena berbagai peluang ekonomi baru baik formal maupun informal menjadi lebih tersedia sebagai dampak ikutan pemekaran Kecamatan Sukamaju Selatan dan pemekaran ini tidak terlepas dari aktor elit yang mempunyai kepentingan. Berangkat dari hasil wawancara dengan Rudi Hartono, S.E., M.Si. sebagai Anggota DPRD Luwu Utara:

*“Diharapkan pemekaran ini mampu mendekatkan pelayanan dengan masyarakat, aktor dibalik pemekaran ini adalah salah satunya kami. Kami mempunyai kepentingan dalam pemekaran ini. Otomatis kami bagaimana caranya proses pemekaran Kecamatan Sukamaju Selatan ini tidak terlalu ribet. Kami selalu berkomunikasi dengan Kementrian Dalam Negeri untuk membicarakan apa-apa yang harus kami lengkapi. Salah satu kepentingannya yaitu pasti ada dampak sosial ekonomi dan politik. Secara sosial ekonomi adalah masyarakat yang jauh karena pelayanan mungkin akan lebih otonom, kalau secara politik adalah selama ini banyak pengangguran dengan lahirnya kecamatan baru tentunya akan menambah ruang bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sudah berpotensi dan memenuhi syarat untuk memegang kecamatan pada kecamatan yang baru dimekarkan”.*⁸¹

Berdasarkan hasil wawancara diatas, pembentukan pemekaran Kecamatan Sukamaju Selatan terdapat macam kepentingan, salah satunya dalam tubuh pemerintah ditingkatkan kecamatan yang mengakomodir pemekaran sebagai aspirasi masyarakat. Wujud otonomi daerah adalah menjadi payung sekaligus alat

⁸¹Rudi Hartono, S.E., M.Si., Umur 36 tahun (Anggota DPRD Luwu Utara Komisi III Bagian Ekonomi dan Keuangan). Wawancara, rumah informan pada tanggal 13 April 2018, 13:23 Wita.

pemerintahan yang juga dapat mengakomodir kepentingan didalamnya. Artinya dengan terbentuknya daerah baru maka pemerintah-pemerintah akan lebih dekat dengan masyarakat, dan pelayanan publik secara efisien. Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagai urusan otonomi daerah dan juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

3. Terbitnya Peraturan Daerah (Perda)

Peresmian dan pembentukan Kecamatan Sukamaju Selatan sudah terlaksana secara efektif, yaitu sejak inisiatif masyarakat hingga diterbitkannya Peraturan Daerah Kecamatan Sukamaju Selatan Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Kecamatan Sukamaju Selatan, dengan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Luwu Utara Nomor: 188.4/2/DPRD-LU/III/2018. Ketua DPRD menyampaikan bahwa tujuan dari pada pemekaran Kecamatan Sukamaju Selatan tersebut melalui prosedur penetepannya mekanisme aturan perundang-undangan yang berlaku. Berangkat dari hasil wawancara dengan Drs. H. Mahfud Yunus, MM. sebagai Ketua DPRD bahwa:

*“Tujuan dari pada pemekaran Kecamatan Sukamaju Selatan yaitu agar mempermudah pelayanan masyarakat yang lebih jauh, mendekatkan pelayanan, percepatan proses pembangunan wilayah kecamatan yang baru dimekarkan, akan menambahkan ruang bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sudah berpotensi dan memenuhi syarat atau perundang-undangan yang berlaku untuk memegang jabatan pada kecamatan yang baru dimekarkan”.*⁸²

⁸²Dr. H. Mahfud Yunus, MM., Umur 54 tahun (Ketua DPRD Luwu Utara). Wawancara, di kantor DPRD Luwu Utara pada tanggal 18 April 2018, 16:06 Wita.

Dari hasil wawancara diatas, diperjelas bahwa dalam proses pembentukan pemekaran Kecamatan Sukamaju Selatan terdapat berbagai macam kepentingan yaitu agar mempermudah pelayanan masyarakat yang lebih jauh, mendekatkan masyarakat, akan menambah ruang bagi Aparatur Sipil Negara untuk memegang jabatan pada kecamatan baru dan tidak terlepas dari peran aktor elit politik yang berusaha dalam proses pemekaran Kecamatan Sukamaju Selatan baik itu masyarakat, tokoh masyarakat, Bupati, Ketua dan Anggota DPRD dan Panitia Khusus pemekaran Kecamatan Sukamaju Selatan. Teori elit lebih menjelaskan bahwa proses pemekaran Kecamatan Sukamaju Selatan ini mempunyai pengaruh dalam ruang lingkup dalam proses pembentukan daerah otonomi baru, di mana masyarakat terdiri dari dua kelas yaitu lapisan atas merupakan elit yang terbagi kedalam elit yang memerintah dan elit yang tidak memerintah, dan lapisan yang lebih rendah yaitu non-elite.

Pemekaran daerah bertujuan untuk meningkatkan pelayanan pemerintah pada masyarakat dalam rangka percepatan pembangunan ekonomi daerah, peningkatan keamanan dan ketertiban untuk mewujudkan keserasian pembangunan antara pusat dan daerah. Pemekaran daerah dapat dijadikan sebagai sarana Pendidikan politik ditingkat lokal untuk sesuai potensi dan cita-cita daerah, dimana setelah terbitnya Peraturan Daerah yang telah melalui proses yang cukup panjang, dengan demikian awalnya usulan pemekaran Kecamatan Sukamaju Selatan melalui usulan masyarakat yang menginginkan adanya perubahan dalam tata kehidupan yang lebih baik dan setelah terbitnya Peraturan Daerah sehingga masyarakat dapat melihat perubahan itu. Berangkat dari hasil wawancara dengan Umar sebagai masyarakat bahwa:

*“Dengan terbentuknya kecamatan baru yaitu Sukamaju Selatan kami sebagai masyarakat yang begitu jauh dengan ibukota kecamatan sebelumnya yang begitu sulit dalam pelayanan dan melalui jalan yang begitu kurang baik sehingga memakan waktu yang banyak. Terbentuknya kecamatan baru ini kami sangat turut bahagia karena dapat mengurangi beban kami sebagai masyarakat yang begitu kesusahan dalam pelayanan ataupun pembangunan ekonomi. Dengan adanya Kecamatan Sukamaju Selatan dapat merubah baik itu pelayanan publik, pembangunan ekonomi dan sebagainya”.*⁸³

Hal yang sama juga disampaikan oleh Yani sebagai masyarakat:

*“Kami sebagai masyarakat dengan adanya Kecamatan Sukamaju Selatan dapat membantu kami nantinya baik dalam pemasaran hasil pertanian kami dan lainnya dalam segi ekonomi serta pemerataan pembangunan, pelayanan yang lebih baik dari sebelumnya dan menambah ruang bagi ASN yang berpotensi dan memenuhi syarat untuk memegang jabatan pada kecamatan baru ini.”*⁸⁴

Berdasarkan hasil wawancara diatas dari kedua masyarakat, untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan bersama di Kecamatan Sukamaju Selatan perlu adanya percepatan pemerataan pembangunan dan ekonomi, sekaligus pelayanan publik yang baik serta menambah ruang bagi ASN yang berpotensi dan memenuhi syarat untuk memegang jabatan pada Kecamatan Sukamaju Selatan sebagaimana diamanatkan dalam pemekaran kecamatan ini bahwa pembangunan dilaksanakan dengan tujuan untuk kemakmuran rakyat serta mengurangi setidaknya pengangguran di Kecamatan Sukamaju Selatan.

⁸³Umar, Umur 55 tahun (Masyarakat Desa Lino Kecamatan Sukamaju Selatan). Wawancara, rumah informan pada tanggal 21 Juni 2018, 10:07 Wita.

⁸⁴Yani, Umur 48 tahun (Masyarakat Desa Mulyorejo Kecamatan Sukamaju Selatan). Wawancara, rumah informan pada tanggal 21 Juni 2018, 13:10 Wita.

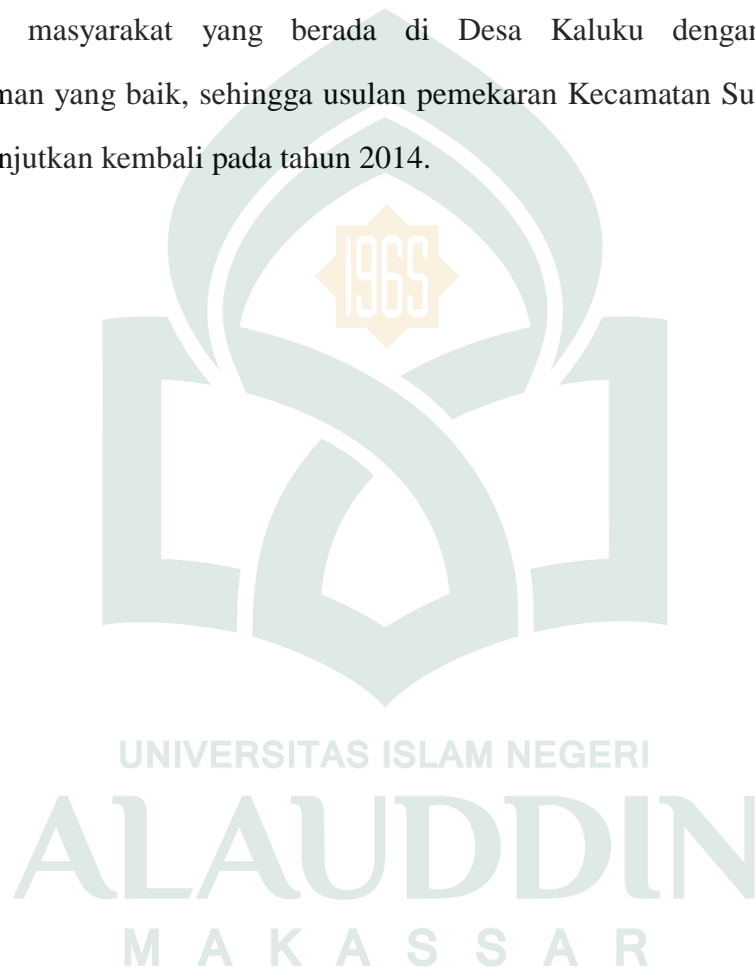
4. Resistensi Pemekaran Kecamatan Sukamaju Selatan di Kabupaten Luwu Utara

Awal mula resistensi didalam proses pemekaran ini dimana masyarakat di Desa Kaluku menginginkan ibukota kecamatan berada pada Desa Kaluku. Namun melihat jarak tempuh yang semakin jauh sehingga masyarakat yang berada diruang lingkup Kecamatan Sukamaju Selatan menginginkan ibukota kecamatan berada pada di Desa Mulyorejo, karena masyarakat yang jauh lebih dekat dalam pengurusan pelayanan publik dari sebelumnya sehingga segala pelayanan publik, pembangunan dan ekonomi dan sebagainya dapat bekerja secara maksimal apabila di ibukota di tempatkan di Desa Mulyorejo. Berangkat dari hasil wawancara dengan Sukma Sabar sebagai Ketua Pemekaran Kecamatan Sukamaju Selatan, mengatakan bahwa:

*“Awalnya pada saat wacana pemekaran ini yaitu pada tahun 2002, kami melakukan perbincangan mengenai pemekaran kecamatan baru antara masyarakat dan tokoh masyarakat. Namun dari pihak sekelompok masyarakat melakukan kepentingan politik sehingga saya pada saat itu melakukan pemberhentian untuk sementara waktu mengenai usulan masyarakat dikarenakan yaitu masyarakat di Desa Kaluku mengingin ibukota kecamatan berada pada Desa Kaluku, namun melihat sebagaimana pemekaran wilayah yaitu lebih mendekatkan pelayanan tetapi tidak akan terjadi apabila ibukota kecamatan berada pada di Desa Kaluku karena semakin jauh dari ibukota kecamatan sebelum pemekaran wilayah yaitu di Desa Sukamaju Kecamatan Sukamaju. Dengan demikian, masyarakat menginginkan ibukota kecamatan baru di Desa Mulyorejo karena lebih dengan pelayanan dan sebagainya”.*⁸⁵

⁸⁵Sukma Sabar, Umur 50 tahun (Ketua Pemekaran Sukamaju Selatan). Wawancara, rumah informan di Desa Sukamaju Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara pada tanggal 27 Maret 2018, 10:46 Wita.

Berdasarkan wawancara diatas, pada umumnya tujuan dari pemekaran ini adalah agar mempermudah pelayanan masyarakat yang lebih jauh, mendekatkan pelayanan, percepatan proses pembangunan disetiap wilayah kecamatan yang baru dimekarkan dan sebagainya, sehingga dengan melakukan musyawarah kembali terhadap masyarakat yang berada di Desa Kaluku dengan memberikan pemahaman yang baik, sehingga usulan pemekaran Kecamatan Sukamaju Selatan bisa dilanjutkan kembali pada tahun 2014.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Latar belakang munculnya isu pemekaran Sekamaju Selatan yaitu terjadi pada tahun 2002 yang dilakukan oleh masyarakat dan tokoh masyarakat dilakukan karena melihat masyarakat yang terisolir dikarenakan jauhnya jarak tempuh yang dilalui untuk melakukan kegiatan di ibukota kecamatan sehingga masyarakat dan tokoh masyarakat melakukan pengusulan dengan terbentuknya Kecamatan Sukamaju Selatan diharapkan bisa mempermudah masyarakat dalam urusan pelayanan, baik dalam urusan administratif dan kependudukan maupun dalam bentuk efisiensi rentang kendali wilayah guna efektifitas pelayanan publik, mampu pemeratakan keadilan dan mampu meningkatkan pertumbuhan pembangunan (ekonomi).
2. Proses pemekaran Kecamatan Sukamaju Selatan terdiri dari tiga tahap besar yaitu 1) Usulan masyarakat, terdapat perbedaan pendapat pemerintah dan masyarakat tentang penempatan ibukota Kecamatan Sukamaju Selatan, 2) Pada saat usulan telah masuk ke program legislasi daerah muncul moratorium pemekaran kecamatan, 3) Terbitnya Peraturan Daerah dalam ini proses pemekaran tidak terlepas dari kepentingan politik. Dalam proses pemekaran Kecamatan Sukamaju Selatan ini tidak terlepas dari aktor elit dalam mengukseskannya terbentuknya pemekaran Kecamatan Sukamaju Selatan. Dukungan dan bantuan dari elit politik Luwu Utara Lutfhy Andi Mufty dalam proses pemekaran ini. Usulan masyarakat dalam pembentukan otonomi baru tidak terlepas dari respon Bupati Luwu Utara yang positif. Begitu pula yang

dilakukan oleh Tokoh Masyarakat, Panitia Khusus, Ketua dan Anggota DPRD Luwu Utara dan lainnya dalam pembentukan daerah otonomi baru untuk mempermudah pelayanan masyarakat, mendekatkan pelayanan, mempercepat proses pembangunan dan menambah ruang bagi ASN yang berpotensi dan memenuhi syarat untuk memegang jabatan pada kecamatan tersebut. Pemekaran ini tidak terlepas dari kepentingan elit, resistensi pemekaran dan sebagainya.

B. Implikasi Penelitian

Dalam deskriptif hasil penelitian ini, penulis ingin menyampaikan implikasi dari hasil penelitian, antara lain:

1. Dengan terbentuknya Kecamatan Sukamaju Selatan, diharapkan bisa mempermudah masyarakat dalam urusan pelayanan, baik dalam urusan administratif dan kependudukan, mampu meningkatkan pembangunan masyarakat.
2. Penulis mengharapkan dengan kepentingan aktor elit politik dalam proses pemekaran Kecamatan Sukamaju mampu lebih memajukan kesejahteraan sosial dan peningkatan pembangunan di Kecamatan Sukamaju Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al Karim.

Abbas, Yulius. Efektivitas Pemekaran Kecamatan dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Tompaso Barat Minahasa: suatu studi pelayanan administrasi legalisir. Ilmu Pemerintahan.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Utara. Kabupaten Luwu Utara Dalam Angka. *Katalog*. 2017. Di unduh di (<https://luwuutarakab.bps.go.id>) pada tanggal 21 Mei 2018 pukul 14:50 Wita.

Chalik. "Ini Syarat Pembentukan Tiga kecamatan Baru di Luwu Utara", *TribunLutra.com*. 03 Mei 2017. <http://makassar.tribunnews.com/2017/05/03/ini-syarat-pembentukan-tiga-kecamatan-baru-di-luwu-utara> (19 November 2017).

_____. "Hasil Pemekaran, Luwu Utara Resmi Punya Tiga Kecamatan Baru", *TribunLutra.Com*. 13 Maret 2018. <http://www.google.com/amp/makassar.tribunnews.com/amp/2018/03/13/hasil-pemekaran-luwu-utara-resmi-punya-tiga-kecamatan-baru?espv=1> (04 Mei 2018).

Dasar Hukum Pembentukan Kabupaten Luwu Utara UU No. 13 Tahun 1999.

Damsar. *Pengantar Sosiologi Politik*. edisi revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

Damanik, Khairul Ikhwan, dkk. *Otonomi Daerah, etnonasionalisme, dan Masa Depan Indonesia: Berapa Persen Lagi Tanah dan Air Nusantara Milik Rakyat*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Erick. "Pemerintah Kabupaten Luwu Utara Respon Pemekaran Tiga kecamatan", *news.rakyatku.com*. 12 Desember 2016. <http://www.google.com/amp/news.rakyatku.com/amp/31155> (19 November 2017).

<http://wikidpr.org/anggota/> (2 Juni 2018).

[Id.m.wikipedia.org/wiki/Sukamaju_Luwu_Utara](http://id.m.wikipedia.org/wiki/Sukamaju_Luwu_Utara) (04 Mei 2018).

Idrus, Muhammad. *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Edisi Kedua. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2009.

Idris, Prof. Dr. Muh. Irfan, M.Ag. dan Dra. Nila Sastrawati, M.Si. *Sosiologi Politik*. Makassar: Alauddin Press, 2010.

Imanuel. "Studi Tentang Proses Pemekaran Kecamatan Malinau Selatan Menjadi Tiga Kecamatan Kabupaten Malinau". *eJurnal Pemerintahan Integratif* 4, no. 2. 2016.

- Irfan, Ahmad. "Dampak Pemekaran Kecamatan Pulau Pisang Kabupaten Pesisir Barat Terhadap Kualitas Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan", *Skripsi*. (Bandar Lampung: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, 2017).
- Karim, Syahrir, M.Si. *Politik Desentralisasi: Membangun Demokrasi Lokal*. Makassar: Alauddin University Press, 2012.
- Kuncoro, Mudrajat, Ph.D. *Perencanaan Daerah: Bagaimana Membangun Ekonomi Lokal, Kota dan Kawasan*. Jakarta: Salemba Empat, 2012.
- Lantara, Lifa Anis Tahara Andi. "Pengaruh Pemekaran Wilayah Kecamatan Terhadap Pembangunan dan Pelayanan Publik di Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara". *Skripsi*. Makassar: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar, 2016.
- Madjangga, Martinus Hinna Hering. "Implikasi Pemekaran Wilayah Desa Terhadap Pelayanan Publik (Studi Terhadap Implikasi Pembentukan Desa Marada Mundi Terhadap Pelayanan Publik Kepada Masyarakat Desa Marada Mundi, Kecamatan Kabata Mapambuhang, Kabupaten Sumba Timur-NTT)", *Skripsi*. Salatiga: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi Universitas Kristen Satya Wacana, 2011.
- Mardiansmo. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: ANDI, 2004.
- Morisa, Andy Corry W dan Farid Hamid U. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Muslim Bin AL Hajjaj bin Muslim Bin Kausyaz AL-Qusyairi An-Naisaburi, *AL Jami' as Shahih*, Jus VI Bairut Daarul Bairut, 1374 H.
- Muqoyyidin, Andik Wahyun. "Pemekaran Wilayah dan Otonomi Daerah Pasca Reformasi di Indonesia: Konsep, Fakta Empiris dan Rekomendasi ke Depan". *Jurnal Konstitusi* 10, no. 2. 2013.
- Rustiadi, Ernan, dkk. *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011.
- Setiadi, Elly M. dan Usman Kolip. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2013.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Sidiq, Umar. "Kepemimpinan Dalam Islam: Kajian Termatik Dalam Al-Qur'an Dan Hadits", *Dialogia*, Vol. 12 No. 1 Juni (2014): h. 10.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Sukmadinata dan Nana Syauidih. *Metode Penelitian*. Bandung: Rosdakarya, 2006.
- Soehartono, Irawan. *Metode Penelitian Sosial: Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011.

- Syamsuddin, Muriyati dkk. *Pedoman Praktis Metodologi Penelitian Internal: pendekatan kualitatif, kuantitatif, pengembangan dan mix-method*. Bandung: CV. Wade Group, 2015.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Daerah kabupaten Luwu Utara Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Kecamatan Sukamaju selatan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan.
- Widjaja, H. A.W. *Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Wijoyo, Tri Banjir Adi. "Pemekaran Desa Ditinjau Dari aspek Otonomi Daerah di Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur (Studi Kasus di Desa Wanasari). *Skripsi*. Makassar: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2013.
- Yusuf, Tata K. "Pengaruh Pelaksanaan Pemekaran Wilayah Terhadap Kualitas Pelayanan Kartu Tanda Penduduk di Kecamatan Majasari". *Skripsi*. Serang: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang, 2010.
- Zakaruddin, Anjar. "Dampak Pemekaran Dalam Ketersediaan Sarana dan Prasarana Masyarakat Desa Waturempe Kecamatan Tikep Kabupaten Muna". *Skripsi*. Makassar: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, 2013.
- Zulkarnain, Ariandi. "Dinamika Proses Pemekaran Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2008-2012". *Tesis*. Pekanbaru: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2012.



BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN SUKAMAJU SELATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa luasnya jangkauan layanan publik, jumlah penduduk dan volume kegiatan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan Sukamaju, yang semakin meningkat, sehingga perlu melakukan pembentukan kecamatan baru sebagai pemekaran dari kecamatan tersebut;
- b. bahwa pembentukan Kecamatan Sukamaju Selatan telah memenuhi persyaratan administrasi, teknis dan fisik kewilayahan untuk dibentuk kecamatan baru;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan Sukamaju;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA

dan

BUPATI LUWU UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN
KECAMATAN SUKAMAJU SELATAN.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDIN
BAB I
KETENTUAN UMUM
M A K A S S A R

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara.

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten/kota.
6. Camat adalah pimpinan dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Pembentukan kecamatan adalah pemberian status pada wilayah tertentu sebagai kecamatan di kabupaten/kota.
8. Kecamatan induk adalah kecamatan yang merupakan asal dari kecamatan yang dibentuk.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pembentukan kecamatan baru adalah untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat dalam satu wilayah kecamatan.
- (2) Tujuan dibentuknya kecamatan baru adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

BAB III

PEMBENTUKAN KECAMATAN

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Sukamaju Selatan.

Pasal 4

Kecamatan Sukamaju Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan pemekaran dari Kecamatan Sukamaju.

Pasal 5

Ibukota kecamatan Sukamaju Selatan berkedudukan di Desa Mulyorejo.

Pasal 6

Wilayah Kecamatan Sukamaju Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari:

- a. Desa Mulyorejo;
- b. Desa Rawamangun;
- c. Desa Paomacang;
- d. Desa Wonokerto;
- e. Desa Sumberbaru;
- f. Desa Banyuwangi;
- g. Desa Subur;
- h. Desa Lino;
- i. Desa Sidoharjo;
- j. Desa Sukamukti; dan
- k. Desa Sukaharapan.

BAB IV

WILAYAH

Pasal 7

Batas Kecamatan Sukamaju Selatan terdiri dari:

- a. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Sukamaju;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Bone-bone;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Malangke; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Mappedeceng.

Pasal 8

- (1) Kecamatan Sukamaju Selatan terletak dikoordinat antara $120^{\circ}23'22,675''$ - $120^{\circ}33'18,787''$ Bujur Timur dan $2^{\circ}24'54,42''$ - $2^{\circ}43'8,298''$ Lintang Selatan.

- (2) Koordinat batas wilayah Kecamatan Sukamaju Selatan terdiri dari:

a. Bujur Timur (BT):

- 1) Timur : $120^{\circ}33'18,787''E$
- 2) Utara : $120^{\circ}32'38,125''E$
- 3) Barat : $120^{\circ}23'22,675''E$

4) Selatan : 120°29'16,337"E

b. Lintang Selatan (LS):

1) Timur : 2°26'34,513"S

2) Utara : 2°24'54,42"S

3) Barat : 2°35'22,986"S

4) Selatan : 2°43'8,298"S

- (3) Peta wilayah administrasi kecamatan tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Wilayah Kecamatan Sukamaju Selatan seluas $\pm 328 \text{ km}^2$.

BAB V

FASILITAS UMUM DAN FASILITAS SOSIAL

Pasal 10

- (1) Lokasi tanah untuk pembangunan sarana dan prasarana fasilitas umum dan fasilitas sosial pada Kecamatan Sukamaju Selatan difasilitasi oleh pemerintah kecamatan induk.

- (2) Penyediaan lokasi tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara partisipatif, swadaya, swadana dan swakelola pemerintah dan masyarakat.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, wilayah kerja, asset dan Aparatur Sipil Negara pada kecamatan induk secara bertahap dialihkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Pemerintrah daerah melaksanakan fasilitasi pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Ditetapkan di Masamba

pada tanggal 2017

BUPATI LUWU UTARA,

INDAH PUTRI INDRIANI

Diundangkan di Masamba

pada tanggal 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ABDUL MAHFUD

ALAUDDIN
MAKASSAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN
2017 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA PROVINSI
SULAWESI SELATAN:



**BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KECAMATAN SUKAMAJU SELATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LUWU UTARA,**

Menimbang : a. bahwa luasnya jangkauan layanan publik, jumlah penduduk dan volume kegiatan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan Sukamaju, yang semakin meningkat, sehingga perlu melakukan pembentukan kecamatan baru sebagai pemekaran dari kecamatan tersebut;

- b. bahwa pembentukan Kecamatan Sukamaju Selatan telah memenuhi persyaratan administrasi, teknis dan fisik kewilayahan untuk dibentuk kecamatan baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan Sukamaju;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
dan
BUPATI LUWU UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN
KECAMATAN SUKAMAJU SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten/kota.
6. Camat adalah pimpinan dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan

otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

7. Pembentukan kecamatan adalah pemberian status pada wilayah tertentu sebagai kecamatan di kabupaten/kota.
8. Kecamatan induk adalah kecamatan yang merupakan asal dari kecamatan yang dibentuk.



BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pembentukan kecamatan baru adalah untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat dalam satu wilayah kecamatan.
- (2) Tujuan dibentuknya kecamatan baru adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

BAB III

PEMBENTUKAN KECAMATAN

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Sukamaju Selatan.

Pasal 4

Kecamatan Sukamaju Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan pemekaran dari Kecamatan Sukamaju.

Pasal 5

Masa Pemerintahan Kecamatan Sukamaju Selatan sebagai Kecamatan Induk yang dibentuk sejak tahun 1984 telah berusia 34 (tiga puluh empat) tahun.

Pasal 6

Ibukota kecamatan Sukamaju Selatan berkedudukan di Desa Mulyorejo.

Pasal 7

Wilayah Kecamatan Sukamaju Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari:

- a. Desa Mulyorejo;
- b. Desa Rawamangun;
- c. Desa Paomacang;
- d. Desa Wonokerto;
- e. Desa Sumberbaru;
- f. Desa Banyuwangi;
- g. Desa Subur;
- h. Desa Lino;
- i. Desa Sidoharjo;
- j. Desa Sukamukti; dan
- k. Desa Sukaharapan.

Pasal 8

Musyawarah desa Kecamatan Sukamaju sebagai kecamatan induk dan musyawarah desa Kecamatan Sukamaju Selatan sebagai kecamatan hasil pembentukan, disepakati sejak tahun 2014 tercantum dalam dokumen proposal usulan pembentukan kecamatan.

BAB IV

WILAYAH

Pasal 9

Batas Kecamatan Sukamaju Selatan terdiri dari:

- a. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Sukamaju;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Bone-bone;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Malangke; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Mappedeceng.

Pasal 10

Wilayah Kecamatan Sukamaju Selatan seluas $\pm 328 \text{ km}^2$ sebagaimana tercantum dalam peta terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB V

PENDUDUK

Pasal 11

Penduduk Kecamatan Sukamaju Selatan berjumlah 20.658 Jiwa setelah dipisahkan dari jumlah penduduk Kecamatan Sukamaju sebagai kecamatan induk yang berjumlah 50.583 jiwa.

BAB VI

FASILITAS UMUM DAN FASILITAS SOSIAL

Pasal 12

- (1) Lokasi tanah untuk pembangunan sarana dan prasarana fasilitas umum dan fasilitas sosial pada Kecamatan Sukamaju Selatan difasilitasi oleh pemerintah kecamatan induk.
- (2) Penyediaan lokasi tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara partisipatif, swadaya, swadana dan swakelola pemerintah dan masyarakat.

BAB VII

KEUANGAN

Pasal 13

Anggaran dalam rangka mendukung kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kecamatan Sukamaju Selatan, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara.

BAB VIII

KETENTUAN PERIHAN

Pasal 14

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, wilayah kerja, asset dan Aparatur Sipil Negara pada kecamatan induk secara bertahap dialihkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Pemerintah daerah melaksanakan fasilitasi pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 13 Maret 2018
BUPATI LUWU UTARA,

TTD
INDAH PUTRI INDRIANI

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 13 Maret 2018

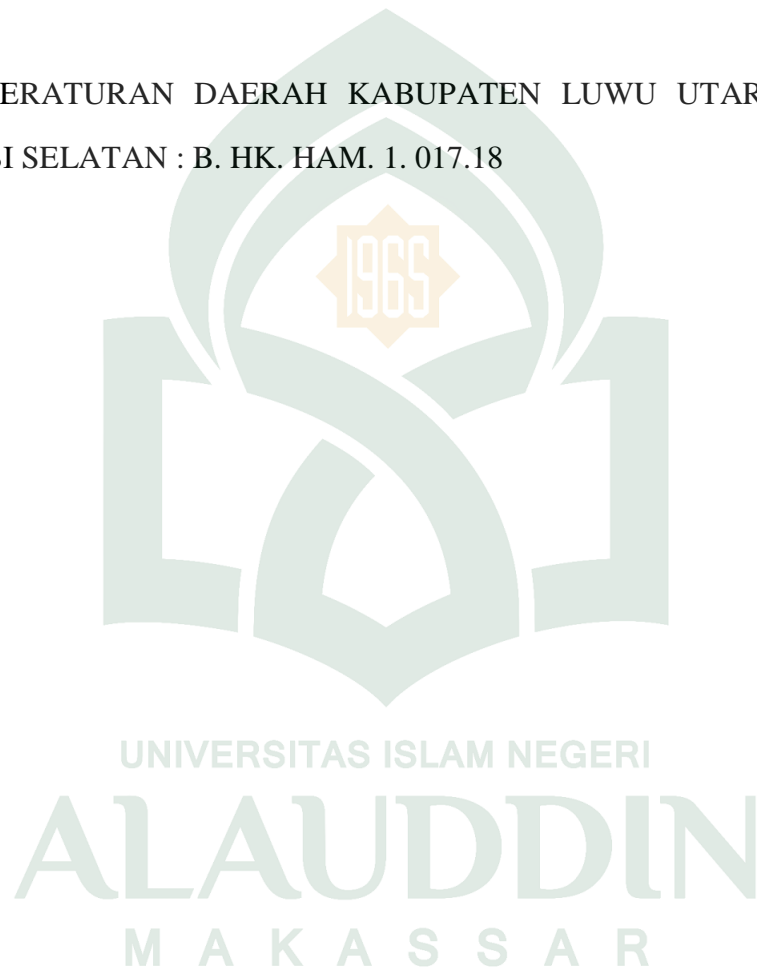
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,

TTD

ABDUL MAHFUD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN
2018 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA PROVINSI
SULAWESI SELATAN : B. HK. HAM. 1. 017.18





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

L

A

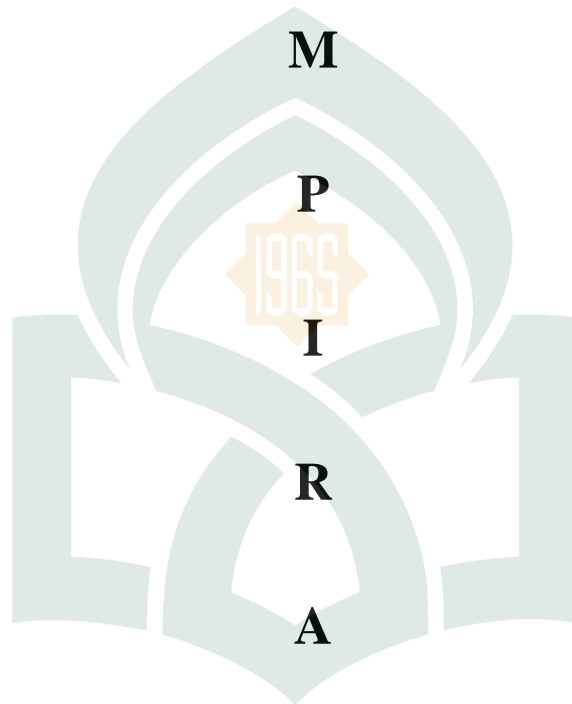
M

P

I

R

A



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
N
ALAUDDIN
Dokumentasi Penelitian
M A K A S S A R



Gambar 1. Wawancara dengan bapak Dr. H. Mahfud Yunus, MM (Ketua DPRD Luwu Utara).



Gambar 2. Wawancara dengan bapak Muhammad Fajar, S.P. (Camat Sukamaju).



Gambar 3. Wawancara dengan bapak Rudi Hartono, S.E., M.Si. (Anggota DPRD Luwu Utara Komisi III bagian Ekonomi dan Keuangan, sekaligus Sekretaris Pansus (Panitia Khusus)).



Gambar 4. Wawancara dengan bapak Armin, S.Sos. (Kabag Pemerintahan Umum Luwu Utara)



Gambar 5. Wawancara dengan bapak Sukma Sabar (Ketua Pemekaran Sukamaju Selatan).



Gambar 6. Wawancara dengan bapak Jamingun, S.H. (Tokoh Masyarakat sekaligus Kepala Desa Sidoraharjo Kecamatan Sukamaju Selatan).



Gambar 7. Wawancara dengan bapak Drs. Muh. Kasrum, M.Si (Kabag Administrasi Pemerintahan Umum Luwu Utara).



Gambar 8. Wawancara dengan bapak Halimun (Tokoh Masyarakat sekaligus Kepala Desa Mulyorejo Kecamatan Sukamaju Selatan).



Gambar 9. Wawancara dengan bapak Halimun (Tokoh Pemuda sekaligus Ketua BPD Desa Mulyorejo Kecamatan Sukamaju Selatan).



Gambar 10. Wawancara dengan bapak Nasrul (Masyarakat Desa Sukamukti Kecamatan Sukamaju Selatan).



Gambar 11. Wawancara dengan bapak Hardi (Masyarakat Desa Sidoraharjo Kecamatan Sukamaju Selatan).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

RIWAYAT HIDUP



EVA YUNITA, lahir tanggal 07 April 1997 di Dusun Libukang Desa Munte Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan. Merupakan anak ke-lima dari enam bersaudara dari pasangan bapak Bahar Muharram dan ibu Nuryadi. Jenjang Pendidikan yang ditempuh mulai dari sekolah dasar (SD) di SD Negeri 208 Munte Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara (2002-2008). Dilanjutkan ke sekolah tingkat pertama (SMP) di SMP Negeri 2 Tana Lili Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara (2008-2011). Kemudian melanjutkan sekolah menengah kejuruan (SMK) di SMK Negeri 1 Luwu Utara Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara (2011-2014). Pada tahun yang sama penulis melanjutkan Pendidikan ke jenjang perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar (2014-2018).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
 MAKASSAR